



Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Berbasis Literasi Ekonomi
dan Modal Sosial



Prof. Dr. Henry J.D. Tamboto, M.Si
Dr. Allen A.Ch. Manongko, M.M

Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial

**Prof. Dr. Henry J.D.Tamboto, M.Si
Dr. Allen A.Ch. Manongko, M.M**



Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial

Penulis:

Prof. Dr. Henry J.D.Tamboto, M.Si

Dr. Allen A.Ch. Manongko, M.M

Editor:

Dr. Mieke O. Mandagi, M.Ap

Tata Letak:

Dr. Soetam Rizky Wicaksono

Penerbit

CV. Seribu Bintang

Malang – Jawa Timur - Indonesia

website: www.SeribuBintang.co.id

email : info@seribubintang.co.id

FB : www.fb.com/cv.seribu.bintang

ISBN : 978-623-7000-01-3

Edisi Pertama, Agustus 2019

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Hak Cipta pada penulis

Hak Cetak dan Distribusi pada penerbit

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA TEORI DAN EMPIRIS.....	19
A. Kemiskinan.....	20
<i>Konsep Kemiskinan.....</i>	<i>20</i>
<i>Faktor Penyebab Kemiskinan Dan Karakteristiknya.....</i>	<i>28</i>
<i>Terjadinya Kemiskinan.....</i>	<i>30</i>
<i>Karakteristik Kemiskinan.....</i>	<i>32</i>
<i>Jenis, Model Pengukuran Dan Indikator Kemiskinan.....</i>	<i>33</i>
<i>Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....</i>	<i>40</i>
B . Kesejahteraan Ekonomi.....	46
C. Modal Sosial.....	58
D. Masyarakat Pesisir.....	88
BAB III. TUJUAN, MANFAAT DAN URGENSI.....	113
A. Tujuan.....	114
B. Manfaat.....	114
C. Urgensi.....	115
BAB IV. METODE DAN PEMBAHASAN.....	117
A. Deskripsi.....	118
B. Metode.....	124
C. Pembahasan.....	126
BAB V. PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
BIODATA PENULIS.....	151

Kerjasama penerbitan



PENGANTAR

Masalah kemiskinan bukanlah gejala baru bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Kondisi nyata kemiskinan tergambar jelas di tengah-tengah masyarakat baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir dengan membentuk dan memiliki kebudayaan khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir, yang sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan. Nelayan selalu diidentikkan sebagai komunitas marginal dan terkebelakang.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multi dimensi yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup, serta kurangnya kemampuan dalam memahami konsep ekonomi. Adanya keterbatasan modal yang dimiliki nelayan yang menyebabkan terjadi kecenderungan nelayan terikat pinjaman dengan *rentenir*, bahkan hubungan antara pedagang ikan dan nelayan cenderung bersifat eksploitatif.

Berbagai program digulirkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menurunkan prosentasi kemiskinan khususnya pada masyarakat pesisir, seperti: program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Program tersebut merupakan perwujudan nyata sebagai komitmen pemerintah guna membantu masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan agar dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan. Berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir dengan membentuk dan memiliki kebudayaan khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir, yang sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan.

Secara kuantitatif, program-program yang digulirkan oleh pemerintah memberikan hasil nyata. Hal tersebut, dapat ditunjukkan oleh data kondisi kemiskinan per September 2018 (BPS, 2019) berada dibawah dua digit yaitu sebesar 9,66% atau sekitar 25,7 juta penduduk miskin atau mengalami penurunan sebesar 1,78 juta atau 1,14%. Namun demikian, kita tidak dapat menyangkal secara kualitatif kesejahteraan ekonomi khususnya masyarakat pesisir belum mengalami peningkatan yang nyata.

Buku ini hadir untuk memberikan deskripsi dan analisis model pengentasan kemiskinan dengan menghadirkan konsep literasi ekonomi dan model sosial dalam menjawab dan membelajarkan serta mengembangkan potensi-potensi lokal masyarakat pesisir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Secara spesifik buku ini membahas beberapa hal yang terkait dengan: permasalahan kemiskinan dengan pertimbangan penelitian-penelitian terdahulu, konsep kesejahteraan ekonomi, konsep literasi ekonomi, dan modal sosial, serta memuat deskripsi masyarakat pesisir di beberapa desa di kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya, tim penulis menyadari buku “MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR (Kajian Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial) ini masih perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritikan, ulasan dan saran baik dari peneliti, penulis, bahkan masyarakat dan pemerintah. Lebihnya, saya memohon maaf kepada semua pihak, bila dalam buku ini adalah

sejumlah tulisan yang keliru penulisannya atau tidak dituliskannya nama penulis dalam bahasan atau daftar referensi. Akhirnya, Semoga buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik sebagai bahan perkuliahan, dan penelitian yang akan datang, sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan para *stakeholder* serta dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Terima kasih,

Penulis

BAB I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada seluruh negara baik negara berkembang atau negara maju. Kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan standar kehidupan yang lain (Herbert, 2001 *dalam* Iskandar, 2012). Hingga saat ini Negara Indonesia masih tetap didera oleh begitu banyak permasalahan, diantaranya: kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Kusnadi (2009) menguraikan persoalan – persoalan yang mengungkapkan bahwa masalah - masalah yang sering dilihat diantaranya: 1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, 2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, 3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4) kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, 5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan 6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Permasalahan kemiskinan bukanlah suatu gejala baru bagi masyarakat Indonesia. Selama puluhan tahun, kondisi kemiskinan itu selalu nyata di tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun di desa. Masyarakat pesisir dengan komunitas rumah tangga petani nelayan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan. Jika pada masyarakat petani terdapat berbagai program subsidi, seperti subsidi pupuk dan benih, maka pada masyarakat nelayan subsidi seperti itu hampir tidak pernah mereka peroleh. Memang di beberapa daerah kadang ada semacam bantuan peralatan tangkap untuk nelayan, namun sering tidak bisa dimanfaatkan oleh nelayan, karena kendala yang

bersifat struktural seperti keharusan adanya agunan yang tidak mereka miliki serta sistem angsuran yang tidak sesuai dengan pola pendapatan mereka. Akibatnya, walaupun beberapa program sudah dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir namun tetap saja kehidupan masyarakat pesisir masih akrab dengan kemiskinan, menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks.

Sebagai negara maritim, Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta Km². Ada sekitar 60 juta Penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan brutto nasional. Tak bisa dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. Secara alamiah laut memang sulit diprediksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan keterbatasan teknologi. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara kita yang berekonomi lemah, kontras dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya, masyarakat kembali menjadi miskin.

Sebagai negara maritim, Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta Km²

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang cair dan bersifat multidimensional. Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan masyarakat yang berprofesi nelayan dalam kondisi kemiskinan. Kusnadi (2009), perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Karakteristik masyarakat pesisir terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, pelaku usaha industri dan jasa maritim serta masyarakat lainnya yang bermukim di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan segmen anak bangsa yang pada umumnya masih tergolong miskin (DKP, 2008).

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan. Ciri umum yang melekat pada masyarakat pesisir Indonesia adalah akses permodalan yang lemah. Permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pesisir itu sendiri. Kekurangan modal ini sangat mengurangi aktivitas usaha masyarakat pesisir, yang ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Kasryno, 1984).

Badan Pusat Statistik (2018) merilis bahwa ekonomi Indonesia periode 2015-2018 tumbuh sekitar 5% cukup mampu menekan angka pengangguran, kemiskinan maupun ketimpangan. Pada 2018, ekonomi domestik berhasil tumbuh 5,17% dari tahun sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta program bantuan sosial yang diterapkan berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan dalam empat tahun. Badan Pusat Statistik juga memberikan informasi bahwa perekonomian makro menunjukkan bahwa ekonomi kita bertumbuh, namun dibalik pertumbuhan itu tersembunyi persoalan sensitif yang dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di tengah bangsa. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan, yakni struktur masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder (Gumelar, 1998). Terkait kemiskinan, capaian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan terdapat penurunan. Dalam 4 (empat) tahun per 20 Oktober 2018 pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sebanyak 1,78 juta jiwa menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018 dibanding 27,73 juta jiwa pada akhir pemerintahan sebelumnya. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut membuat angka penduduk miskin juga turun 1,14% menjadi 9,82% dari 10,96% pada September 2014. Persentase penduduk miskin satu digit ini merupakan yang pertama kali pasca

terjadinya krisis moneter 1998. Jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibanding perkotaan.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder

Pada akhir Maret 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 15,81 juta jiwa atau sebesar 13,2% dari total populasi. Sementara penduduk miskin diperkotaan hanya 10,14 juta jiwa atau sekitar 7,02% dari total populasi. Namun oleh beberapa pemerhati mengatakan bahwa turunnya angka kemiskinan tersebut masih dianggap semu. Pasalnya penurunan tersebut karena kebijakan instan pemerintah pemberian bantuan sosial seperti program Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan, dan bukan dari meningkatnya produktivitas masyarakat (BPS 2018 dan databoks.co.id).

Berangkat dari kondisi dan data di atas, catatan yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana rumah tangga nelayan yang 90% mendiami wilayah pesisir dapat menikmati kehidupan yang seperti dinikmati oleh rata-rata penduduk dengan pendapatan Rp.47,96 juta atau 3.605,1 dollar AS (Wikipedia.org). Kerumitan dan kompleksitas permasalahan yang dialami masyarakat pesisir, telah menimbulkan pro dan kontra di antara pihak-pihak yang peduli dengan permasalahan kemiskinan dan masyarakat pesisir. Sejumlah permodelan yang diungkap oleh peneliti-peneliti tentang pengentasan kemiskinan daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, hingga saat ini belum mampu mengangkat kesejahteraan nelayan. Program pemberdayaan oleh pemerintah belum cukup mengentaskan rumah tangga nelayan dari masalah kemiskinan.

Sejumlah hasil penelitian tentang kemiskinan dan nelayan telah banyak dipublikasikan, sebagian besar mengangkat implementasi program-program pengetasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan permodelan pengentasan kemiskinan, yang berupaya memecahkan akar permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan tradisional. Ayu Diah Amalia (2015) mengungkapkan bahwa kemiskinan dapat dipecahkan dengan modal sosial yang berkaitan dengan jaringan sosial. Muhammad Risal (2016), mengungkapkan gambaran kondisi masyarakat nelayan di desa Bonde Kabupaten Majene yang memiliki perekonomian yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat nelayan di desa Bonde menyebabkan faktor lahirnya kemiskinan struktural.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder

Kemiskinan struktur terjadi oleh adanya faktor yakni adanya patron-klien dan perkembangan modernisasi. Bentuk strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa Bonde yakni dengan mengurangi pola konsumsi kehidupan keluarga, bekerja di sektor yang lain secara kreatif sebagai bentuk melawan kemiskinan struktur.

Rosni (2017) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu 63,63% tergolong dalam prasejahtera, 31,81% tergolong dalam sejahtera I, dan 4,56% tergolong dalam sejahtera II. Terkait dengan upah minimum Kabupaten Batubara tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.313.625, masyarakat prasejahtera pendapatannya Rp.

897.000, masyarakat sejahtera I Rp.1.149.000, dan masyarakat sejahtera II Rp. 1.470.000. Iin Indarti (2015), mengungkapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan yang berkelanjutan. Adapaun Neng Kamarni (2012), Otniel Pontoh (2010), dan Bambang Rustanto (2007) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan dapat dipecahkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan penguatan modal sosial. Demikian halnya dengan Ali Imron HS (2012), Yenida, Elni (2016), dan Edwin Wantah (2017) mengungkapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin khususnya di wilayah pesisir diperlukan strategi dan upaya yang efektif melalui pembelajaran ekonomi, kerjasama dan keterlibatan secara terus menerus oleh pemerintah. Oleh Peter Garlans Sina (2012), Neti Budiwati (2014), Lilik Sri Hariani (2015), Dias Kanserina (2015) mengungkapkan bahwa persoalan kemiskinan sebenarnya disebabkan oleh ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memahami konsep ekonomi, sehingga diperlukan kecakapan atau literasi ekonomi sebagai upaya memperbaiki pola konsumsi, gaya hidup maupun pengelolaan keuangan dari masyarakat.

Sejumlah hasil penelitian tentang kemiskinan dan nelayan telah banyak dipublikasikan, sebagian besar mengangkat implementasi program-program pengetasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan permodelan pengentasan kemiskinan, yang berupaya memecahkan akar permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan tradisional.

Penelitian tentang masyarakat nelayan sebagian besar berfokus pada aspek sosial ekonomi. Hasil studi tersebut

menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat kita yang sangat intensif didera kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi *et al.* 2007). Oleh Hisbullah (2006) menjelaskan salah satu variable positif yang mempengaruhi kesejahteraan adalah adanya modal komunitas sebagai modal sosial yang dimiliki oleh komunitas masyarakat pesisir.

Beberapa indikasi modal sosial yang tergambar menunjukkan bahwa indikator seperti partisipasi sosial masyarakat di dalam komunitas; tingkat resiprositas dan proaktiviti di dalam kegiatan sosial; perasaan saling mempercayai dan aman; jaringan dan koneksi dalam komunitas; jaringan dan koneksi antar teman dan keluarga; toleransi dan kebhinekaan; nilai hidup dan kehidupan; koneksi / jaringan kerja di luar komunitas; partisipasi dan keanggotaan kelompok di luar komunitas.

Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Hisbullah (2006) memberikan pertimbangan indikasi-indikasi dari modal sosial adalah partisipasi dalam suatu jaringan; *reciprocity*; *trust*; norma sosial; nilai-nilai; dan tindakan yang proaktif. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang bersumber pada kekuatan modal sosial masyarakat sendiri telah

terbukti dapat mengurangi sikap *selfish* dan *free rider*, dan akhirnya cenderung lebih efektif mendorong ke arah pemanfaatan sumberdaya yang *sustainable* (Nasution *et al.* 2007). Modal sosial dapat menjadi modal stimulan yang dimiliki oleh komunitas nelayan untuk terbukanya peluang dan potensi modal lainnya. Konsep modal sosial, yang awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya, mereka membuat kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya.

Modal sosial diartikan pula sebagai stock kepercayaan sosial, norma dan jaringan dimana masyarakat dapat menggambarkan penyelesaian masalah umum (*Putnam, 1993*). Modal sosial dapat menjadi dasar dan penentu kehidupan masyarakat yang teratur dan sejahtera. Modal sosial dapat merupakan potensi sekaligus energi dalam menjembatani dan memperkuat bahkan menstimuli potensi modal lainnya dalam suatu komunitas. Pada intinya modal sosial menjadi potensi yang dapat dioptimalkan oleh individu dalam suatu komunitas untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi.

. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang bersumber pada kekuatan modal sosial masyarakat sendiri telah terbukti dapat mengurangi sikap selfish dan free rider, dan akhirnya cenderung lebih efektif mendorong ke arah pemanfaatan sumberdaya yang sustainable

Selain modal sosial, upaya memberikan penguatan bagi rumah tangga petani/nelayan dapat berupa proses pembelajaran yang bertujuan memberikan kecakapan dalam kajian ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang efisien dan efektif serta ekonomis. Pembelajaran

yang sementara ini masih secara formal dilakukan pada pendidikan regular (formal) dapat dijadikan pertimbangan dalam pembelajaran secara informal dan non formal, yaitu literasi ekonomi.

Konsep literasi ekonomi diartikan sebagai melek ekonomi yang dimaknai konsumen atau rumah tangga konsumsi dapat berpikir dan bertindak secara rasional dalam aktivitas ekonomi. Yunus, dkk. (2010) melakukan penelitian tentang literasi ekonomi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan ekonomi, tabungan, pengeluaran dan investasi memiliki hubungan dengan literasi ekonomi dan untuk mengukur sejauh mana pendidikan ekonomi, tabungan, pengeluaran dan investasi mempengaruhi literasi ekonomi. Pembelajaran literasi ekonomi dilakukan melalui pengalaman dan penanaman sikap, untuk membentuk individu sebagai pelaku ekonomi yang efektif dan efisien di lingkungan keluarga. Pembelajaran ini bersifat nonformal, yang dicirikan oleh rencana yang tidak sistematis, tidak terjadwal dan tidak dirumuskan dengan jelas, target dan tujuannya.

Konsep literasi ekonomi diartikan sebagai melek ekonomi yang dimaknai konsumen atau rumah tangga konsumsi dapat berpikir dan bertindak secara rasional dalam aktivitas ekonomi

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, buku ini menyajikan hasil dan temuan penelitian yang mengkaji dan mengembangkan model pengentasan kemiskinan berbasis literasi ekonomi dan modal sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di kabupaten Minahasa Utara. Perspektif literasi ekonomi ditinjau dari kemampuan rumah tangga nelayan memahami dan

mengimplementasikan konsep ilmu ekonomi secara praktis. Sedangkan modal sosial ditinjau dari dimensi partisipasi dalam jaringan, reciprocity, trust, norma sosial, nilai-nilai, dan tindakan yang proaktif. Dan kesejahteraan ekonomi ditinjau dari dimensi tingkat pendapatan dan kelayakan hidup.

BAB II.
KAJIAN PUSTAKA
TEORI DAN EMPIRIS

A. Kemiskinan

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat didefinisikan secara berbeda tergantung dari pengalaman dan perspektif para penilai/analisis. Cara pandang masing-masing orang akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan; bagaimana kemiskinan terjadi; apa sajakah penyebab kemiskinan; dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar supaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, diperlukan elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif dan objektif. Konsep kemiskinan telah mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Batas pemenuhan minimum yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan. Sedangkan kebutuhan non makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya. Data kemiskinan ini dapat diperoleh dari data Susenas. Garis kemiskinan merupakan

indikator kemiskinan pada tingkat makro, karena data Susenas merupakan data perkiraan penduduk miskin Indonesia yang disajikan hanya pada tingkat provinsi/kabupaten.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum.

Untuk tingkat mikro BPS menggunakan data survei Pendataan Sosial Ekonomi penduduk (PSE). Berbeda dengan data kemiskinan makro, pada PSE dilakukan dengan pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Ada 14 indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin, yaitu: (1) luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²; (2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu,kayu murah; (3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia, kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester; (4) tidak memiliki fasilitas jamban; (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; (6) sumber air berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/air hujan; (7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; (8) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; (9) hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun; (10) hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari; (11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan dan puskesmas/poliklinik; (12) sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan kurang dari 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau buruh lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600,000,- per bulan; (13) pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/ tidak

tamat SD/hanya SD; (14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500,000,-.

Bappenas (2005) menyatakan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik baik bagi perempuan maupun laki-laki. Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Pendekatan tersebut antara lain: pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) serta pendekatan *objective* dan *subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam

masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat terkait dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya kemiskinan dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain tersebut diperhitungkan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III) dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah keluarga prasejahtera (PKS) dan keluarga sejahtera I (KS-I). Adapun 5 indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera I adalah: Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing; Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih; Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian; Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah; dan Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin mengikuti KB pergi ke sarana pelayanan kesehatan (BPS 2011)

Menurut World Bank (2000), kemiskinan merupakan suatu masalah yang bersifat multidimensi sebagai berikut: Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing to know how

to read. Poverty is not having job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness bring about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom. Walaupun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensidimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan yang dapat diterima, yang semuanya berada dalam lingkup dimensi ekonomi. Aset dalam hal ini mencakup: human assets, natural assets, physical asset, financial assets dan social assets (World Bank 2000). Ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and asset) bahkan telah dilihat sebagai salah satu penyebab utama dari kemiskinan.

World Bank mengungkapkan bahwa kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan pendapatan US\$ 1 per hari bagi negara yang tergolong negara berpendapatan sangat rendah (*very low-income countries*). Kemiskinan diukur dengan standar pendapatan US\$ 2 untuk negara-negara tergolong negara dengan pendapatan sedang (*middle-level income countries*). Garis Kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 bukan merupakan nilai tukar US\$ resmi tapi merupakan nilai *purchasing power parity*/paritas daya beli (PPP).

Kotze (dalam Hikmat, 2004) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang

bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel "Poverty and Human Development" mengatakan bahwa: "The case for human development is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves" (pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).

Untuk memecahkan masalah kemiskinan, perlu kebijakan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (*gepeng*), dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya. Pada umumnya, penduduk yang tergolong miskin adalah "golongan residual", yakni kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus, seperti melalui IDT, namun secara umum sudah melalui PKT, Program Bimas, Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan, NKKBS, KUD, PKK didesa.dsb. Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan

dasar manusia, dan perlindungan hukum atau perundang-undangan yang tidak kurang memihak mereka.

Kemiskinan meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Kriteria lain tentang pendudukan miskin berkenaan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menurut versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa untuk menentukan penduduk miskin paling tidak memenuhi 6 (enam) kriteria sebagai berikut: 1. Rumah layak huni: a) milik sendiri dan b) bukan milik sendiri, 2. Akses air bersih dan sanitasi, 3. Pendapatan/dikonversi dengan pengeluaran, 4. Kepemilikan aset, 5. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan, 6. Dalam setahun dapat membeli minimal 1 stel pakaian baru. Dari 6 (enam) variabel/kriteria tersebut jika mendapat skor 3 atau lebih maka keluarga tersebut dikategorikan miskin. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial.

Faktor Penyebab Kemiskinan Dan Karakteristiknya

Kemiskinan bersifat multidimensional, yang berarti tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja seperti ketiadaan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*), akan tetapi terkait dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa kemiskinan disuatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor non ekonomi. World Bank (2000) menjelaskan penyebab kemiskinan antara lain: 1) kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, 2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan terbatas, 3) pembangunan yang bias, 4) perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, 5) perbedaan sumberdaya manusia dan sector ekonomi, 6) rendahnya produktivitas, 7) budaya hidup yang jelek, 8) tata pemerintahan yang buruk, dan 9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Ajakaiye dan Adeyeye (2002) menyatakan bahwa secara mikro factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga adalah: a) umur dan pendidikan anggota rumahtangga khususnya kepala rumahtangga, b) jumlah anggota rumahtangga yang mempunyai pekerjaan, c) komposisi dan besaran rumahtangga, d) asset yang dimiliki oleh rumahtangga, e) akses pada jasa pelayanan sosial dasar, f) jenis kelamin kepala rumah tangga, g) peubah lokasi, h) sektor lapangan kerja. Indikator utama kemiskinan menurut Bappenas (2005) adalah: 1) kecukupan dan mutu pangan terbatas, 2) mutu dan akses layanan kesehatan terbatas, 3) akses dan mutu layanan pendidikan rendah dan terbatas, 4) kesempatan kerja dan berusaha terbatas, 5) perlindungan terhadap aset usaha rendah dan perbedaan upah, 6) akses layanan perumahan dan sanitasi terbatas, 7) akses terhadap air bersih terbatas, 8) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah yang lemah, 9) kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam memburuk, serta akses masyarakat terhadap sumberdaya

alam terbatas, 10) jaminan rasa aman rendah, 11) partisipasi rendah, 12) beban kependudukan tinggi yang disebabkan oleh tanggungan keluarga yang besar, dan 13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, korupsi dan jaminan sosial terhadap masyarakat rendah. Sahdan (2005) mengemukakan bahwa penyebab utama kemiskinan desa adalah: 1) pengaruh faktor pendidikan yang rendah, 2) ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian, 3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian, 4) alokasi anggaran kredit yang terbatas, 5) ketersediaan bahan kebutuhan dasar yang terbatas, 6) kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota), 7) pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional, 8) produktivitas dan pembentukan modal yang masih rendah, 9) budaya menabung yang belum berkembang di kalangan masyarakat desa, 10) tata pemerintahan yang buruk (*bad governance*) yang secara umum masih berkembang di pedesaan, 11) tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa, serta 12) jaminan kesehatan yang rendah. Tambunan (2004) menyatakan bahwa penyebab utama dari kemiskinan perkotaan di Indonesia adalah kemiskinan atau ketertinggalan ekonomi di pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia kurang berkembang dibandingkan dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Ekonomi pedesaan didominasi oleh sektor pertanian. Ketika lahan pertanian semakin banyak terkonversi untuk tujuan lain, maka hal ini mendorong peningkatan migrasi dari desa ke kota. Namun mereka yang pindah dari pedesaan ke kota besar sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak karena mereka umumnya berpendidikan rendah.

Terjadinya Kemiskinan

Tidak sedikit penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya (Hardiman dan Midgley, *dalam* Kuncoro, 1997).

Kuncoro (1997) mengatakan bahwa kecenderungan penduduk miskin dari suatu negara dikarenakan oleh ketergantungannya pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Sharp, et.al (*dalam* Kuncoro, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (*dalam* Kuncoro, 1997): adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan

investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkarulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. Soetrisno (1995), menguraikan bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dan penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna

Dan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam beaisaha mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim dan lain-lain). Faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.

Karakteristik Kemiskinan

Kartasasmita (1996) mengungkapkan bahwa umumnya masyarakat miskin karakteristiknya terkait lemahnya dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Soemardjan (*dalam* Sumodingrat 1991), mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut: *Pertama*, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; *Kedua*, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif kerana berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Chamber (1983) mengemukakan lima karakteristik sebagai ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) *poverty*, (b) *physical weakness*, (c) *isolation*, (d) *powerlessness*.

Moeljarto (1995) mengemukakan tentang *Poverty Profile* sebagaimana berikut: Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain : (a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. (d) Kemiskinan juga berarti

menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Selanjutnya Supriatna (1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain: 1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas, dan 5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang bagaimana yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

Jenis, Model Pengukuran Dan Indikator Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu : 1). Kemiskinan absolut. Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. 2). Kemiskinan relative. Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat kehidupan golongan atas dan

golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan (BPS 2011).

Kemiskinan absolut. Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak.

Terminologi lain yang pernah juga dikemukakan tentang jenis kemiskinan adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. BPS (2011) mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh karena kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Kondisi struktur ini disebabkan karena tatanan sosial yang tidak adil sehingga menyebabkan masyarakat gagal memperoleh peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya yang menyebabkan masyarakat terperangkap dalam kondisi serba kekurangan/miskin. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan karena kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha dan merubah tingkat kehidupannya. Untuk mengukur kemiskinan ada beberapa ukuran atau indeks yang sering digunakan para ahli dalam penelitian empiris, diantaranya adalah Foster Greer Thorbecke (1984) : 1). *Poverty headcount index* (P0) yang merupakan suatu ukuran kasar dari kemiskinan karena hanya melihat pada proporsi dari

penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, ukuran ini hanya menjumlahkan berapa banyak orang miskin yang ada dalam perekonomian, selanjutnya dibuat persentasenya terhadap total penduduk; 2). *Poverty Gap Index* (P1) yang mengukur kedalaman kemiskinan didalam suatu wilayah. Indeks ini mengestimasi jarak atau perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut, dan 3). *Squared poverty gap* (P2) yang menunjukkan keparahan kemiskinan dalam suatu wilayah. Secara sederhana indeks P2 dapat didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat kesenjangan kemiskinan (*squared poverty gap*). Ukuran P2 telah mempertimbangkan kepelikan kemiskinan (*severity of poverty*) di dalam suatu wilayah dan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin tersebut. Oleh karena itu indeks ini sering juga disebut sebagai indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*) (BPS, 2011).

Di Indonesia terdapat beberapa model penghitungan kemiskinan, yaitu Model Tingkat Konsumsi, Model Kesejahteraan Keluarga dan Model Pembangunan Manusia, yaitu:

a. Model Tingkat Komsumsi

Sayogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Beliau membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang pertahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang pertahun. Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah

bahwa BPS tidak menyertakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan model konsumsi susenas (survey Sosial Ekonomi Nasional)

b. Model Kesejahteraan Keluarga

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survey pada BPS digunakan rumah tinggal sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini tentunya sejalan dengan visi program Keluarga Berencana (KB) yaitu “ Keluarga yang Berkualitas”. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendekatan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu: Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dan lainnya; Data Keluarga Berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam katagori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III. Data kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin),

Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus.

c. Model Pembangunan Manusia

Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu: *United Nation Developmen Program* (UNDP). Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut *Human Development Report (HDR)* dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selanjutnya mengembangkan model ini. HDR yang pertama dibuat pada tahun 1996 untuk situasi tahun 1990 dan 1993. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 telah menjadikan model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai “Pembangunan Manusia Seutuhnya”. Laporan terakhir tahun 2004 yang menjelaskan keadaan pada tahun 1999 dan 2002. HDR berisikan penjelasan tentang empat index yaitu index Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)*, Index Pembangunan Jender atau *Gender Development Index (GDI)*, Langkah Pemberdayaan Jender atau *Gender Empowerment Measure (GEM)* dan *Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI)*. HDI dengan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat daya beli perkapita. HPI, dengan indikator kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang dewasa, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan, dan persentase balita yang kurang makan. GDI, indikatornya adalah tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan, tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan

perempuan, rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan. Sedangkan GEM indikatornya adalah persentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan, persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan.

Pengukuran angka kemiskinan dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengukur pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling esensial-lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks tersebut dihitung dengan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

b. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Mengukur dimensi yang berlawanan arah dari IPM, yaitu seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal (*deprived people*), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks tersebut dihitung menggunakan prosentase penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun, prosentase penduduk buta huruf, prosentase balita dengan status gizi kurang, prosentase balita dengan status gizi kurang, prosentase penduduk tidak punya akses pada pelayanan kesehatan dasar, sanitasi air bersih. Semakin besar penduduk suatu wilayah pada situasi ini dipresentasikan oleh IKM yang semakin tinggi.

c. Indeks Kehidupan Fakir Miskin

Mengukur kesenjangan pencapaian, yaitu berapa upaya, dalam prosentase, yang masih harus dilakukan/dicapai untuk membawa kondisi kehidupan fakir miskin di suatu wilayah menuju standar kehidupan minimum yang layak. Dimensi yang diukur mencakup (1) situasi kelaparan atau sangat kurang kalori,

(2) Kualitas hidup fakir miskin, (3) Akses fakir miskin pada pelayanan sosial dasar dan pembangunan.

Di Indonesia untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan menggunakan lima versi indikator kemiskinan, sebagai berikut: Versi Bank Dunia; kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin adalah mereka yang berpendapatan maksimal UU\$ 2 per hari; Versi *International Labour Organization (ILO)*; Yaitu orang miskin di pedesaan jika pendapatan maksimal US\$ 0,8; Versi BKKBN yang mendefinisikan kemiskinan dengan 5 indikator 1) Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya, 2) Seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, 3) Seluruh anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian, 4) Bagian terluas rumahnya terdiri atas tanah, 5) tidak mampu membawa keluarga jika sakit ke sarana kesehatan; Versi Dinas Kesehatan menambahkan kriteria tingkat akses pelayanan kesehatan pemerintah, ada anggota keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari dua kali dan kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak; dan Versi BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/per hari dan kebutuhan minimal non makanan (sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). Disamping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan Rp. 175.324,- per bulan sebagai batas miskin perkotaan dan Rp. 131.256,- di pedesaan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial.

Korten (*dalam* Hikmat, 2004) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu: 1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas; 2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi, dan 3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangun-an yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif,

pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah.

Berkenaan dengan strategi pemberdayaan, Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (dalam Hikmat, 2004) mengemukakan bahwa ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. 1) *Strategi tradisional*, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan, 2) *Strategi direct-action*, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi, dan 3) *Strategi transformatif*, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Setiap strategi terdiri atas teori, konsep, dan keahlian yang melekat erat pada masing-masing strategi yang kemudian dirinci ke dalam delapan teori khusus, sepuluh konsep, dan dua belas keahlian. Semua tanda yang ada di dalam matriks itu memberikan informasi yang cukup untuk menjamin terciptanya hubungan yang harmonis antara satu dan lainnya. Penggunaan matriks

tersebut akan memberikan klarifikasi terhadap bagian-bagian penting dalam praktek perubahan sosial bagi orang-orang yang terlibat. Pada tahap awal, para praktisi akan bekerja dengan baik melalui sosialisasi diri mereka terhadap tiga komponen dasar teori, konsep, dan keahlian sebagaimana usaha untuk memahami kategori ketiganya. Berdasarkan hal ini, perbandingan dari ketiga perbedaan metode perubahan sosial tersebut dapat dibuat.

Dengan demikian menurut Hikmat (2004) bahwa proses pembangunan masyarakat hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu pada semakin membesarnya partisipasi dalam struktur sosial; b) Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh warga masyarakat dewasa ini harus dijadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat; c) Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat harus disalurkan kedalam perencanaan dan tindakan pemecahan masalah bersama; d) Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus mengikutsertakan pemimpin-pemimpin yang diidentifikasi dan diterima oleh berbagai kelompok sosial utama dalam masyarakat; e) Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu untuk saling bekerjasama melaksanakan prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (*decision making*) secara teratur; f) Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan. Mengapa pula pembangunan masyarakat dipandang sangat penting, Hikmat (2004)

mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut: 1. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif. 2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa. 3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat. 4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat.

Relevansinya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, memang diakui bahwa secara nasional telah dilaksanakan melalui program jaring pengaman sosial (QPS) atau *social safety net* (SSN) dan program kompensasi (CP) yang dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan atau *Poverty Alleviation* (PA). Pada prinsipnya, program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi semakin miskin dan terpuruk, serta agar dapat hidup layak (Haryono, 1998; Justika, 1998). Sebagai inovasi sosial, JPS sudah mulai diterapkan pada awal 1880-an ketika pemerintah Otto von Bismark di Jerman dan David Lloyd George di Inggris melembagakan sistem perlindungan dan jaminan sosial (*social security*). Untuk selanjutnya, program ini diikuti oleh Amerika Serikat yang mulai diluncurkan pada 1935, Eropa Timur yang diluncurkan pada 1980-an (Justika, 1998). Adapun JPS masuk ke Indonesia termasuk ke dalam paket program strategi penyesuaian struktural atau *Structure Adjustment Programme* (SAP) yang disodorkan oleh lembaga internasional seperti *International Monetary fund* (IMF) dan *the World Bank* berbarengan dengan pinjaman yang akan dikucurkan (Yulfita, 1998).

Sementara itu, Program Kompensasi (*Compensatory Programme*) bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk menolong penduduk yang secara langsung terkena dampak

kebijakan penyesuaian struktural ekonomi (*economic structural adjustment*). Kebijakan yang berlangsung secara bersamaan ini juga menimbulkan eksekusi bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (Haryono, 1998). Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan program intervensi pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih, silih asuh dan silih asah*. Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (*Gerdu Taskin*) yang dicanangkan pemerintah sejak 1998. *Gerdu Taskin* merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah, kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan organisasi masyarakat, masyarakat luas, serta keluarga miskin itu sendiri. Sebagai upaya konkret kearah itulah maka sejak tahun 1998/1999 diimplementasikan kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) selanjutnya apa yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK atau PNPM-P2KP) yang secara substantif menggugah partisipasi aktif masyarakat dalam ikutserta dalam gerakan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan peran pemerintah dalam setiap program pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik itu, Sumodiningrat (1999) menegaskan bahwa: Program

pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan yakni pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan

Sementara itu Rondinelli (1990) mengemukakan ada tiga strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin yakni: 1. Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas orang miskin hidup, melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa. 2. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia. 3. Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio ekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu.

B . Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al.*, 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Fergusson *et al.*, (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just *et al.*, 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen.

Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currihan, 1999; Lambert *et al.*, 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward

et al. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan.

Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin *et al.*, (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al.*, (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status

pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *et al.*, 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau

pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di

digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut: Keluarga pra sejahtera; Keluarga sejahtera tahap I; Keluarga sejahtera tahap II; Keluarga sejahtera tahap III; dan Keluarga sejahtera tahap III plus.

Beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstruk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury *et al.*, (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra

sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga *altruistik* melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga. Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang *altruistik*. Sedang Narayan *et al.* (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor. Can Anyone Hear Us?*" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi.

Khomsan *et al.* (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang

digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut BKKBN dan BPS. Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Cantril (1965) menemukan negara-negara dengan pendapatan per kapita yang berbeda jauh seperti Nigeria dan Jepang, atau Mesir dan Jerman Barat, tidak berbeda dalam tingkat rata-rata kepuasan hidup atau kesejahteraan subjektif yang diungkapkan oleh warga negara mereka. Sedang Schneider (1975) melaporkan bahwa korelasi antara karakteristik objektif kota dan ukuran kesejahteraan subjektif survei pada warga masing-masing dapat dikatakan nol. Selanjutnya, dalam survei nasional yang dilakukan di USA selama periode antara 1957 dan 1972, ketika sebagian besar indikator ekonomi dan sosial

bergerak naik, proporsi penduduk yang menggambarkan diri mereka sebagai "sangat senang" terus menurun. Hal tersebut menyimpulkan bahwa kesejahteraan objektif suatu negara, kelompok, atau seseorang tidak dapat hanya diperkirakan berdasarkan ukuran objektif. Kepuasan dan kebahagiaan jelas tergantung pada kemampuan untuk bertahan, tingkat kesehatan wajar, dan situasi yang mendukung tercapainya keinginan atau aspirasi (Henshaw, 1973).

Salah satu komponen kesejahteraan subjektif berhubungan dengan kepuasan. Kepuasan melibatkan perbandingan kondisi objektif untuk beberapa standar hidup (Cheng, 1988). Campbell *et al.* (1976); McKennell (1978); McKennell dan Andrews (1980), menyimpulkan kepuasan terkait dengan harapan dan perbandingan standar pada keadaan saat ini (*standard quality of life*/SQL). Sedang McKennell (1978), menyatakan bahwa pemahaman tentang SQL akan semakin maju ketika hubungan sebab akibatnya dapat dipahami.

Andrews dan Withey (1976) menegaskan bahwa orang bisa memisahkan kehidupan mereka menjadi bagian perbagian yang, meskipun tidak terisolasi, cukup terpisah untuk diidentifikasi dan dievaluasi sebagai bagian dari kehidupan. Bagian kehidupan yang terkait dengan kegiatan, peran, tempat, dan hubungan dengan orang-orang dalam kehidupan individu. Sejauh mana seseorang ingin dan membutuhkan dan merasa puas dalam bagian tertentu dalam kehidupannya adalah kesejahteraan subjektif untuk bagian tersebut; dengan demikian, kita bisa berbicara tentang kesejahteraan kerja, kesejahteraan keluarga (Rice, 1984).

Andrews dan Withey (1976) melakukan penelitian pada hal-hal yang bersifat lebih mendasar berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Sebaran responden yang lebih luas mencakup beragam lembaga nasional dan internasional. hasilnya dua belas

dimensi dapat diidentifikasi dan digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan. Campbell *et al.* (1976) juga menentukan dimensi kesejahteraan atas dasar hasil penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan cakupan luas yang lebih luas dalam penerapannya ke populasi umum. Penelitian menampilkan beberapa dimensi tertentu yang akhirnya umum digunakan di sebagian besar studi, di antaranya: kerja, rekreasi, kesehatan, situasi keuangan, hubungan dengan anggota keluarga, hubungan dengan teman, lingkungan sosial dan fisik, dan aspek pemenuhan kebutuhan individu. Kesimpulan berdasarkan nilai kepuasan lebih sering digunakan untuk menilai kesejahteraan dari pada ukuran kebahagiaan. Dikarenakan penggunaan ukuran kebahagiaan tampaknya tidak sesuai untuk beberapa dimensi (Cheng, 1988), sehingga sulit untuk membangun skala dimensi.

Nilai kepuasan telah terbukti menimbulkan bias yang lebih rendah dalam pengukuran dimensi (Campbell *et al.*, 1976). Bias muncul ketika timbul penilaian tentang sesuatu yang baik lebih kepada perasaan individu tertentu dan tidak dapat mewakili standar objektif yang lebih luas. Kepuasan lebih dapat dijadikan standar penilaian ketika secara umum nilai kebahagiaan bisa menimbulkan perbandingan yang beragam seperti misalnya pengukuran pada hubungan pernikahan dan keluarga. Demikian pula, hasil penelitian Glatzer (1987) menunjukkan bahwa ada kecenderungan tingkat kepuasan yang lebih rendah pada dimensi kesejahteraan pada aspek individu dibandingkan aspek, hal tersebut mungkin muncul ketika pada penilaian aspek individu muncul sikap yang kurang kritis. Dimensi kesejahteraan yang digunakan mengikuti format Campbell *et al.* (1976). Indikator penilaian biasanya akan mengikuti karakteristik khusus dari dimensi tersebut yang dapat dinilai dengan tingkat kepuasan. Ketika dimensi terkait dengan lingkungan responden, indikator yang dipergunakan kemungkinan seperti keamanan, hubungan

antar ras, kualitas udara, status, dan kualitas sekolah (Allen *et al.*, 1985). Setiap pengukuran dimensi juga akan cenderung untuk memasukkan beberapa indikator objektif, seperti misalnya status rumah berdasarkan sewa atau milik sendiri.

Solomon *et al.* (1980) melaporkan bahwa program kualitas hidup UNESCO, menyatakan variabel subjektif harus diperhitungkan bersama dengan ukuran objektif. UNESCO menyarankan setiap upaya harus diarahkan untuk membandingkan distribusi pola variabel "pemuas" dengan kepuasan, dan analisa perbedaan dan mekanisme *mediating* di antara variabelnya adalah salah satu bidang yang paling penting dan paling berharga dari penelitian tentang kualitas hidup.

Sejumlah penelitian dilakukan untuk menghasilkan daftar ukuran kesejahteraan. Penelitian Cantril (1965) di 13 negara untuk menentukan harapan mereka, ketakutan dan kekhawatiran, dan mengatakan kehidupan seperti apa yang mereka nilai sebagai "mungkin yang terbaik" atau "mungkin terburuk". Hasil dari penelitian tersebut adalah daftar 18 dimensi kesejahteraan yang bisa dikatakan sepenuhnya mewakili masyarakat Amerika. Penelitian Flanagan (1978) pada hampir sejumlah 3000 orang dari berbagai usia, ras, latar belakang, dan wilayah negara, mengidentifikasi 15 indikator kesejahteraan yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi, yaitu: 1) kesejahteraan fisik dan materi; hubungan dengan orang lain; 2) sosial, masyarakat, dan pemerintahan; 3) pemenuhan kebutuhan dan pengembangan individu; dan 5) hiburan.

C. Modal Sosial

Konsep modal sosial yang dijadikan fokus penelitian ini pertama kali dikemukakan oleh Coleman (1988) yang mendefinisikannya sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antar-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Coleman membedakan antara modal sosial (*social capital*), modal fisik (*physical capital*) dan modal manusia (*human capital*). Modal sosial menjadi topik perhatian dan perdebatan setelah penelitian Robert Putnam di Italia yang menemukan modal sosial berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah, dengan kesimpulan bahwa modal sosial sebagai “*connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them*” (Putnam, 1993a).

Coleman (1988), ahli sosiologi Amerika mengatakan bahwa modal sosial "is not a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure". Bourdieu (1980), ahli sosiologi Prancis mendefinisikan modal sosial sebagai "the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition". Menurut Fukuyama (1995), modal sosial adalah “an instantiated informal norm that promotes co-operation between two or more individuals. By this definition, trust, networks, civil society, and the like, which have been associated with social capital, are all epiphenominal, arising as a result of social capital but not constituting social capital itself”. Narayan (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai "the rules, the norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relations, social structure and society's institutional arrangements which

enable members to achieve their individual and community objectives". Menurut World Bank (1998), "Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions", dan Uphoff (2000), menyatakan "Social capital can be considered as an accumulation of various types of intangible social, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior".

Menurut *World Bank* (1998), modal sosial tidaklah sesederhana hanya sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara bersama-sama. Berbeda dengan modal manusia yang menekankan segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu, modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada dimensi-dimensi modal sosial seperti jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial mencakup *institutions, relationships, attitudes* dan *values* yang mengarahkan dan menggerakkan interaksi-interaksi antar orang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Modal manusia dibagi dalam dua sudut pandang, yaitu dari perspektif sosial (komunitas) dan perspektif individu. Modal sosial dapat menjadi modal stimulan yang dimiliki oleh suatu populasi untuk membuka potensi modal lainnya seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam dan sumber daya finansial (Laola, 2011). Dari sudut pandang sosial, modal adalah semua aset yang menghasilkan pendapatan secara kolektif. Sedangkan modal individu adalah sesuatu yang diharapkan

pemiliknnya akan memberikan penghasilan padanya. Hal tersebut merujuk pada pendapat Scoones (1998); Hancock (1999); Uphoff (2000); Ellis (2000); Hasbullah (2006); dan Salman (2012), maka modal komunitas adalah aset (individu maupun kolektif) yang diinvestasikan atau yang mendukung investasi secara langsung untuk menjadi sumber penghidupan bersama, yang terdiri atas modal: alam, fisik, keuangan, manusia dan sosial.

Menurut Hasbullah (2006) modal sosial dapat ditinjau berdasarkan karakter sosial budaya masyarakat terdiri dari dua jenis, yaitu modal sosial terikat dan modal sosial yang menjembatani. Perbedaan keduanya dapat ditemui melalui penggambaran karakter-karakter sosial budaya di masyarakat yang terkait dengan karakter setiap modal sosial. Berdasarkan hasil analisis terhadap masyarakat nelayan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki tipologi modal sosial terikat beserta penyebabnya menyiratkan perlunya kebijakan dalam rangka meningkat modal sosial di masyarakat nelayan tersebut. Kebijakan dimaksud adalah perbaikan struktur sosial yang terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat nelayan. Penelitian ini menjelaskan gambaran tentang identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kemudian penulis menggunakan pendekatan studi kasus guna mempelajari organisasi sosial ekonomi dan variabel yang terkait secara lebih mendalam. Penulis memaparkan bahwa karakter sosial budaya (yang menjadi ciri atau karakter modal sosial dimasyarakat nelayan) diketahui melalui pendekatan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat (Jamasy, 2006). Faktor internal mencakup: (a) pola organisasi sosial dalam suatu komunitas yang mencakup kepercayaan lokal, pola dan sistem produksi dan reproduksi serta politik lokal, dan (b) norma dan nilai-nilai yang melekat dalam komunitas. Faktor eksternal dapat dirangkum dalam pengaruh

agama, pendidikan serta sistem dan hubungan politik dan pemerintahan dengan luar komunitas. Namun dalam mengidentifikasi karakter sosial budaya masyarakat nelayan, penulis merinci faktor-faktor pemaparannya tersebut menjadi empat faktor. Faktor-faktor yang dipaparkan penulis beserta contohnya adalah: (1) faktor nilai dan norma masyarakat: nilai yang terdapat dalam masyarakat nelayan di desa ini beranggapan bahwa laut tidak ada yang memiliki, tidak terdapat batasan wilayah operasional, dan tidak melakukan tindakan konservasi, (2) faktor kepercayaan dan organisasi lokal: para nelayan anggota suatu kelompok tertentu masih terjerat dalam pola permodalan melalui peminjaman uang kepada para tengkulak bunga tinggi. Belum ada tindakan kolektif yang terkait agama ataupun kepercayaan yang mereka anut. Nelayan memiliki kepercayaan bahwa seluruh hasil tangkapan adalah anugerah yang patut disyukuri, (3) faktor pola dan sistem produksi dan reproduksi: Masyarakat di daerah penelitian adalah nelayan dan beberapa individu yang merangkap juga mengerjakan pertanian. Nelayan belum tampak berupaya mengadopsi alat tangkap yang lebih modern dari daerah lain, (4) faktor politik lokal. Dari aspek kepemimpinan, masyarakat nelayan menilai kepemimpinan berdasarkan wibawa dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Karakteristik kepemimpinan yang dimaksud menggiring kepada figur-figur atau tokoh-tokoh yang berlandaskan kemampuan ekonomi. Hasbullah (2006) mengungkapkan modal sosial berdasarkan karakter sosial budaya masyarakat terdiri dari dua jenis, yaitu modal sosial terikat dan modal sosial yang menjembatani. Perbedaan keduanya dapat ditemui melalui penggambaran karakter-karakter sosial budaya di masyarakat yang terkait dengan karakter setiap modal sosial. Penulis menggunakan modal sosial terikat untuk mendeskripsikan hasil temuan. Yakni masyarakat nelayan yang umumnya homogen

(tingkat kesejahteraan, pendapatan dari mata pencaharian), perhatian penulis terfokus pada upaya nelayan menjaga nilai-nilai turun-temurun telah diakui dan dijalankan sebagian dari tata perilaku dan perilaku moral dari komunitas kemudian nelayan lebih mengutamakan *solidarity making* dari pada hal-hal yang lebih nyata untuk lebih mensejahterakan diri.

Menurut Lawang (2004), modal sosial menunjuk pada semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal-modal lainnya. Hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut (Ibrahim, 2006).

Menurut Knack and Keefer (1997), modal sosial dapat menjadi identifikasi untuk mengukur kinerja ekonomi Pada level makro indikatornya adalah munculnya *trust*, *civic norms* dan aspek modal sosial sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan La Porta *et al.*, (1997): “...*cross-country analyses are pointing to social capital as an important ingredient in economic performance*”. Seperti diungkapkan oleh Busse (2001), dalam hidup keseharian, modal sosial atau hubungan antar individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yang digunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. Menurut Tonkiss (2000), modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi. Dalam laporan World Bank

(2006), ada bukti yang nyata bahwa perdagangan pada level makro dipengaruhi oleh modal sosial.

Fafchamps dan Minten (1999), menyatakan bahwa akumulasi modal sosial terbukti memberikan peran yang sangat nyata dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, *return to social capital* dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Penelitian Brata (2004) di Yogyakarta menemukan bahwa modal sosial berupa jaringan bermanfaat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersifat informal, ketika bantuan formal dari pemerintah sangat terbatas. Keadaan ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Bastelaer (2000), bahwa anggota masyarakat yang paling miskin yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, menjadikan jaringan-jaringan sosial sebagai elemen penting untuk memenuhi permodalannya. Menurut Kolopaking (2002), bahwa modal sosial berperan mulai dari kegiatan tahap awal dalam kegiatan di tingkat komunitas, dilanjutkan dengan memproduksi usaha kecil dan gurem dari komunitas ke organisasi desa, dan akhirnya menjadi unsur pengelolaan kolaborasi serta memelihara jejaring kolaborasi. Jejaring menjadi sarana untuk membentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Beberapa penelitian mengenai modal sosial dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan kolektif telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Ohama (2001) di Luzon Tengah (Filipina), menemukan bahwa kerja kolektif tidak hanya mengentaskan komunitas petani dari perangkap kemiskinan, melainkan berhasil juga mengkreasi sebuah modal sosial (*social capital*) dalam bentuk berkembangnya organisasi rakyat "*Ugnayang Magsasakang San Siomon (UMSS)*". Beberapa kasus lain di berbagai Negara Amerika Latin dan Karibia, seperti El Salvador, Jamaica, Venezuela, Columbia, Argentina, dan Bolivia menunjukkan adanya korelasi modal sosial dengan pengurangan jumlah rakyat miskin melalui

program yang dinamai sebagai “*Government, Business, and Civic Partnerships for Poverty Reduction*” (Fiszbein dan Lowden, 1999). Hasil penelitian yang dilakukan Lubis (2002) tentang modal sosial dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama (lubuk larangan) di Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara; Penelitian Suhaeb (2007) yang meneliti hubungan modal sosial dengan kedinamisan penyuluh pertanian swakarsa; Laola (2011) meneliti hubungannya dengan perilaku ekonomi petani; Suhirman *et al.* (2012) mengenai modal sosial dengan pengelolaan sumberdaya hutan; Muspida (2007) dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan kemiri rakyat; Suandi (2007); Vipriyanti (2007) keterkaitan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi wilayah; Pranadji (2006) mengenai penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pengelolaan agrosistem lahan kering; dan Wafa (2003), dalam penelitiannya melihat bagaimana modal sosial bermanfaat bagi kelompok tani “Mardi Utomo”.

Terdapat banyak penelitian di Indonesia, yang meneliti tentang pengaruh pentingnya modal sosial jika dikembangkan dalam masyarakat. Penelitian Badaruddin (2006) terhadap komunitas nelayan menemukan bahwa salah satu faktor penyebab sulitnya komunitas nelayan tradisional dan nelayan buruh keluar dari perangkap kemiskinan adalah rendahnya atau tidak berkembangnya modal sosial dalam komunitas tersebut. Hasbullah (2006) menambahkan, masalah mendasar yang perlu dikaji tentang kegagalan program dan kebijakan terkait dengan kesejahteraan selama ini, adalah langkah dalam mengidentifikasi faktor yang sangat menentukan yaitu modal sosial masyarakat. Ibrahim (2006) menyebutkan bahwa modal sosial menjadi lebih berarti bila dikembangkan dengan modal lain yang dimiliki komunitas lokal.

Coleman (1988) mendefinisikan modal sosial sebagai variabel yang mencakup: a) struktur sosial; dan b) fasilitasi tindakan di dalam struktur. Komponen kedua cenderung menganggap bahwa modal sosial sama kedudukannya dengan modal material (*economic capital*) maupun modal sumber daya manusia (*human capital*), meski konsep modal sosial dianggap lebih abstrak dan mencakup hubungan/relasi sosial di dalamnya. Artinya, modal sosial dikembangkan melalui sikap saling tergantung, penerapan norma-norma, serta konsekuensi dari kepemilikan (Portes, 1998).

Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) menyebutkan bahwa modal sosial tidak terletak pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan pada tingkat negara (*state*). Lebih lanjut Putnam menyebutkan bahwa hubungan sosial adalah cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (timbal balik). Putnam juga menyebut bahwa kepercayaan, norma dan jaringan sosial cenderung saling memperkuat (*self reinforcing*) dan bersifat kumulatif. Ramon dan Schwartz (1995) berpendapat bahwa terdapat empat nilai yang melekat pada modal sosial yaitu: a) *universalism* yakni nilai tentang pemahaman terhadap orang lain, apresiasi, toleransi serta proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya; b) *benevolence* yakni nilai tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain; c) *tradition* yakni nilai yang mengandung penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional; dan d) *comformity* yakni nilai yang mengandung keselamatan, kehormatan, kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri.

Lebih lanjut Putnam (1993) menyebutkan bahwa modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan

jaringan-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi bagi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Menurut Putnam, kerjasama sukarela lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik (*reciprocity*), dan jaringan-jaringan kesepakatan antar-warga. Fukuyama (1995) yang mengkaji bidang ekonomi menyebutkan bahwa modal sosial yang berintikan kepercayaan (*trust*) merupakan dimensi budaya dari kehidupan ekonomi (*cultural dimension of life*) yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pretty dan Ward (1999) menyebut modal sosial sebagai “the cohesiveness of people in their societies, and comprises relations of trust, reciprocity and exchanges between individuals that lubricate co-operation; the bandies of common rules, norms and sanctions mutually-agreed or hended-down: and connectedness, networks and groups”. Pengertian konsep modal sosial yang diberikan sejumlah peneliti akan lebih mudah dipahami dengan mengenal dimensi-dimensi pokok yang dilekatkan kepadanya. Sedang Adams dan Someshwar (1996) merumuskan sebagai “social capital refers to sustained social relations that facilitate cooperation within and between groups of individuals”. Menurut Saleh (2009), bahwa munculnya keragaman defenisi atas modal sosial adalah sesuatu yang lumrah ketika konsep ini semakin luas dikaji dan digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena.

Penelitian Mackie (1998) menyimpulkan bahwa kunci sukses pebisnis Cina dalam tataran global antara lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) kepercayaan internasional pada *xinyong* (kepercayaan) yang berfungsi sebagai perekat yang mengikat transaksi perdagangan; dan (2) *guanxi* (hubungan pribadi) sebagai alat untuk mereduksi biaya transaksi dalam bisnis yang

dilakukan dalam berbagai situasi dimana perlindungan hukum untuk pelaksanaan kontrak sering tidak dapat diandalkan. Bila dikaitkan dengan konsep modal sosial, maka kedua faktor tersebut merupakan dimensi-dimensi dari modal sosial. Artinya, pemanfaatan modal sosial merupakan salah satu kunci sukses pebisnis Cina dalam tataran global. Menurut World Bank (1998), *social capital* tidaklah sesederhana hanya sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara bersama-sama. *Social capital* meliputi *shared values* dan *rules* bagi perilaku sosial yang terekspresikan dalam hubungan-hubungan antar personal, *trust* dan *common sense* tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, semua hal tersebut menjadikan masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu-individu. Secara inheren *social capital* mengandung *social sense*. Hampir semua bentuk *social capital* terbentuk dan tumbuh melalui gabungan atau kombinasi tindakan dari beberapa orang.

Keputusan masing-masing pemain atau pelaku memiliki konsekuensi kepada semua anggota kelompok atau group. Sehingga hal tersebut mencerminkan suatu atribut dari struktur sosial. Seperti dikemukakan oleh Dhesi (2000), bahwa *social capital* bukan merupakan *private property* dari orang yang mendapat manfaat darinya. Hal ini hanya akan muncul dan tumbuh kalau dilakukan secara bersama (*shared*). Sehingga *social capital* bisa dikatakan sebagai *property* dari *public good*. *Social capital* akan tumbuh dan semakin berkembang kalau digunakan secara bersama dan sebaliknya akan mengalami kemunduran atau penurunan bahkan suatu kepunahan dan kematian kalau tidak digunakan atau dilembagakan secara bersama. *Social capital* tidak dapat diwariskan sepenuhnya secara otomatis dari generasi ke generasi seperti pewarisan genetik dalam pengertian biologi. Pewarisan *social capital* dan nilai-nilai

yang menjadi atributnya memerlukan suatu proses adaptasi, pembelajaran serta pengalaman dalam praktek nyata. Proses ini akan tumbuh dan berkembang dalam waktu yang panjang melalui interaksi yang berulang-ulang yang memungkinkan susana untuk saling membangun kesepahaman, kepercayaan serta nilai dan aturan main yang disepakati bersama antar pelaku kerjasama.

Menurut Grootaert (1998), modal sosial mempunyai enam dimensi, yakni: 1) jumlah keanggotaan; 2) tingkat keberagaman anggota kelompok/organisasi; 3) intensitas pertemuan; 4) tingkat pengambilan keputusan; 5) besarnya tingkat kontribusi (uang dan tenaga); dan 6) orientasi masyarakat. Sedang *World Bank* dalam Grootaert (1999), melihat bahwa modal sosial memiliki dimensi, sebagai berikut: (1) jaringan/ikatan hubungan dan kelompok/organisasi; (2) solidaritas dan kepercayaan; (3) kegotong royongan (*collective action and cooperations*), (4) komunikasi dan informasi; (5) inklusi dan kohesi sosial dalam masyarakat; dan (6) kebijakan dan pemberdayaan. Krishna dan Uphoff (1999) membedakan modal sosial ke dalam dua dimensi komplementer yaitu dimensi struktural dan dimensi kognitif. Kedua dimensi tersebut memiliki elemen-elemen umum yang mendorong tingkah laku bekerjasama secara menguntungkan.

Winter (2000) mengidentifikasikan modal sosial menjadi enam dimensi, yakni: 1) kebiasaan (tipe perjanjian: formal dan informal); 2) tujuan bersama (antar institusi saling hormat menghormati); 3) hubungan dalam pergaulan "*bridging*" (*trust dan reciprocity*) saling membangun secara bersama; 4) modal sosial sebagai perantara (kepercayaan dapat membangun sistem kedekatan antar individu); 5) intensitas hubungan (intensitas hubungan antar individu merupakan kekayaan dan keuntungan ganda dalam masyarakat); dan 6) lokasi sosial (menjalin hubungan kekerabatan (tetangga) dengan baik dapat membangun sumber daya modal sosial). Haddad dan Maluccio (2000)

membagi modal sosial kedalam tiga dimensi, yakni: 1) tingkat partisipasi rumahtangga dalam kelompok; 2) fungsi kelompok bagi rumahtangga; dan 3) tingkat kepercayaan rumah tangga dalam kelompok.

Menurut Woolcock (2001), modal sosial dapat dilihat dari tiga tipe ikatan hubungan atau koneksi (*type of networks*). Pertama, modal kekerabatan, yaitu ikatan hubungan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan (emosional tinggi) yakni: hubungan antar anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga. Kedua, modal pergaulan yaitu tingkat kekerabatan relatif lebih jauh seperti: teman kerja, dan kolega. Ketiga, hubungan kelembagaan, yaitu ikatan hubungan lebih renggang lagi dibandingkan kedua ikatan hubungan diatas. Hubungan kelembagaan hanya dapat terjadi pada ikatan hubungan secara formal (*formal institutions*) baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan beberapa penelitian memberi pemahaman bahwa modal sosial tersebut berintikan elemen-elemen pokok yang mencakup: (1) saling percaya (*trust*), yang meliputi adanya kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianism*), toleransi (*tolerance*) dan kemurahan hati (*generosity*); (2) jaringan sosial (*networks*), yang meliputi adanya partisipasi (*participations*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*), kerjasama (*colaboration/cooperation*), dan keadilan (*equity*); dan (3) pranata (*institutions*), yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama (*shared value*), norma-norma dan sanksi-sanksi (*norms and sanctions*), dan aturan-aturan (*rules*) (Lubis, 2002). Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut bukanlah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, melainkan harus dikreasikan dan ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme

sosial budaya di dalam sebuah unit sosial seperti keluarga, komunitas, asosiasi sukarela, negara dan sebagainya.

Badaruddin (2006) dalam penelitian yang berjudul “Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara” menyebutkan beberapa elemen pokok dari modal sosial sebagai hasil penelusuran para ahli. Elemen pokok modal sosial tersebut mencakup: 1) saling percaya (*trust*), yang meliputi; adanya kejujuran (*honesty*), kewajaran, (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianism*), toleransi dan kemurahan hati (*generosity*); 2) jaringan sosial (*networks*) yang meliputi; partisipasi, pertukaran timbal-balik (*reciprocity*), solidaritas, kerjasama (*collaboration*), dan keadilan; 3) pranata (*institutions*) yang meliputi; nilai-nilai yang dimiliki bersama (*share value*), norma-norma dan sanksi-sanksi (*norms and sanctions*), dan aturan-aturan (*rules*). Sedang Hasbullah (2006) mengidentifikasi 6 dimensi modal sosial yaitu: 1) kehidupan asosiasi yang menyangkut hubungan-hubungan formal maupun informal dalam suatu urusan yang bersifat horizontal; 2) jaringan itu sendiri; 3) masyarakat politik yang menjadi penengah antara hubungan masyarakat dan negara; 4) institusi dan kerangka kebijakan yang melibatkan aturan-aturan formal; 5) norma-norma yang mengatur kehidupan publik; dan 6) nilai-nilai sosial.

Beberapa defenisi modal sosial menunjukkan bahwa modal sosial merupakan konstruk yang sangat menentukan bagi terbangunnya kerjasama antar individu atau kelompok atau terbangunnya suatu perilaku kerjasama kolektif. Berkaitan dengan penelitian ini, dalam modal sosial selalu tidak terlepas pada tiga elemen pokok yang ada pada modal sosial yang mencakup: 1) kepercayaan (*trust*) yang dapat dipersamakan dengan kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati; 2) jaringan (*networks*) yang dapat dipersamakan dengan partisipasi, resiprositas, solidaritas, dan kerjasama; dan 3)

norma (*norms*) yang dapat dipersamakan dengan nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, dan aturan-aturan.

modal sosial merupakan konstruk yang sangat menentukan bagi terbangunnya kerjasama antar individu atau kelompok atau terbangunnya suatu perilaku kerjasama kolektif.

Ketiga elemen pokok modal sosial di atas berikut aspek-aspeknya pada hakikatnya adalah elemen-elemen yang ada atau seharusnya ada dalam kehidupan sebuah kelompok sosial, apakah kelompok itu bernama komunitas, masyarakat, suku bangsa, atau kategori lainnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Kepercayaan (*Trust*)

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu dengan lainnya. Membangun rasa percaya adalah bagian dari proses kasih sayang yang dibangun sejak awal dalam suatu keluarga. Sepanjang adanya rasa percaya dalam perilaku dan hubungan kekeluargaan, maka akan terbangun prinsip-prinsip resiprositas dan pertukaran (Bordieu, 1985). Lebih sempit lagi Dasgupta dan Serageldin (2000) melihat *trust* sebagai "*Individual forming expectations about action of others that have a bearing on this individual's choice of action, when that action must be chosen before he or she can observe the actions of those others*".

Trust atau rasa percaya (kepercayaan) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung,

paling tidak. yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993; 1995; 1996; 2000). Menurut Fukuyama (1995), *trust* didefinisikan sebagai “*the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly share norms, on the part of other members of that community*”. Sementara Ostrom (1992), menggambarkan *trustworthiness* sebagai nilai yang tertanam dalam diri (*intrinsic values*) dan motivasi dalam diri (*intrinsic motivation*) seseorang untuk selalu bertindak secara kooperatif, selalu bekerja sama. Istilah “*trust*” di sini berhubungan dengan kejujuran dan kerjasama yang ada di antara orang-orang dalam sebuah komunitas.

Dalam pandangan Fukuyama (1995), *trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Sedang Pretty dan Ward (1999), mengemukakan adanya hubungan saling percaya merupakan unsur penting bagi terjadinya kerjasama. Hubungan-hubungan sosial yang dilandasi oleh prinsip resiprositas dan pertukaran akan menumbuhkan kepercayaan, karena setiap pertukaran akan dibayar kembali (*repaid and balanced*). Menurut Casson dan Godley (2000), mendefinisikan rasa percaya sebagai menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak benar. Rasa percaya memudahkan terjalannya kerjasama. Semakin tebal rasa saling percaya semakin kuat kerjasama yang terbangun antar individu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2002), yang menyoroti bagaimana bekerjanya elemen modal sosial yakni kepercayaan dalam suatu populasi masyarakat etnis Cina. Dia melihat bahwa kepercayaan antar anggota anggota merupakan perekat kuat untuk terjalannya kerjasama yang lebih baik. Setiap anggota percaya kepada yang lainnya karena mereka

jujur, bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan anggota (bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok individu). Beberapa indikator *trust* dikumpulkan datanya, yang menunjukkan perasaan saling mempercayai yang memberikan rasa aman yakni: a) Percaya meninggalkan rumah, untuk berpergian ke luar kota, bahwa rumah yang ditinggalkan akan aman; b) percaya bahwa tetangga akan ikut mengawasi keamanan rumah yang ditinggalkan; c) percaya bahwa tetangga semuanya adalah orang yang baik; d) perasaan aman berjalan sendiri di jalanan setelah malam hari; e) persetujuan pada pendapat bahwa setiap orang dapat dipercaya; f) reputasi aman di area tempat tinggal; g) perasaan percaya pada pemerintah; h) perasaan percaya pada anggota legislatif; i) perasaan percaya pada pemimpin lokal; dan j) perasaan percaya pada tokoh agama yang ada dalam komunitas dan yang berada di luar komunitas. Bentuk kepercayaan (*trust*) yang dimiliki setiap individu tidak hanya terdapat dalam kesamaan religi saja melainkan sudah menyebar pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh setiap individu baik itu pada pengusaha etnis Cina dalam komunitasnya akan memberikan kontribusi dalam strategi berbisnis.

Lawang (2004) menyebutkan bahwa inti kepercayaan antar manusia terdapat tiga hal yang saling terkait, yaitu: a) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih, termasuk dalam hubungan ini adalah institusi yang dalam pengertian ini diwakili orang; b) Harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak; dan c) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. Hasbullah (2006) mengatakan bahwa “rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan

sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung”. Rasa percaya menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial.

2) Jaringan (*Networks*)

Menurut Coleman (1988; 1990), modal sosial melalui jaringan sosial dapat berperan dalam membentuk modal manusia dan ekonomi. Sedangkan Putnam (2000) menyatakan bahwa pemikiran dan teori tentang modal sosial memang didasarkan pada kenyataan bahwa “jaringan antara manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas. Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik) atau pendidikan (disebut juga modal manusia). Secara bersama-sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama.

Menurut Field (2003), hubungan manusia sangat berarti baginya sebagai individu. Dapat dikatakan bahwa kita, setidaknya sebagian, diartikan melalui siapa yang kita kenal. Secara lebih luas, ikatan-ikatan di antara manusia juga berperan sebagai dinding pembatas bagi struktur-struktur sosial yang lebih luas. Ide sentral dari modal sosial adalah bahwa jaringan-jaringan sosial merupakan suatu aset yang bernilai jaringan-jaringan menyediakan suatu basis bagi kohesi sosial karena menyanggupkan orang untuk bekerjasama satu sama lain dan bukan hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung agar saling menguntungkan.

Menurut Lawang (2004), dimensi jaringan (*networks*) dalam modal sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan (*trust*) yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma (*norms*) yang ada. Pada konsep jaringan dalam modal sosial menunjuk pada

semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jaringan sosial (*networks*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerjasama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma (*norms*) dan rasa saling percaya (*trust*).

Dalam menganalisis jaringan dalam modal sosial, Granovetter (2005) mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi. Menurutnya terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: 1) norma dan kepadatan jaringan (*network density*); 2) lemah atau kuatnya ikatan (*ties*) yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah; 3) peran lubang struktur (*structural holes*) yang berada di luar ikatan lemah ataupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar; dan 4) interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata memengaruhi tindakan ekonominya.

Jaringan sosial sebagai fungsi informatif diartikan pula media informasi atau jaringan informasi yang memungkinkan setiap *stakeholders* dalam jaringan dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan masalah, peluang, serta kegiatan usaha. Fungsi informasi seperti ini dapat dilihat sebagai fungsi pelumas (*lubricant*) (Anderson *et al.*, 2004). Fungsi informatif ini bisa juga berfungsi peluang (*opportunity*), berfungsi katalisator, dan berfungsi akses terhadap keberhasilan suatu usaha produktif

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakhmania (2006), pada etnis Cina di Jakarta maka didapati institusi keluarga dan ikatan kekerabatan adalah modal sosial yang menopang bisnis etnis Cina. Ikatan kekeluargaan menyediakan jaringan sosial di kalangan etnis Cina, di mana jaringan sosial ini berdasarkan kepercayaan. Melalui jaringan sosial tersebut bisnis mereka makin meningkat. Dengan adanya modal sosial pada etnis Cina terjadilah perkembangan bisnis-bisnis. Di sini terlihat bagaimana modal sosial dapat berfungsi dan bermanfaat bagi bisnis etnis Cina bila mereka mampu mempergunakan modal sosial sebaik-baiknya.

3) Norma-norma (*Norms*)

Menurut Blau (1964), norma (*norms*) tidak dapat dipisahkan dari jaringan (*networks*) dan kepercayaan (*trust*). Kalau struktur jaringan itu terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi, sifat norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Karena itu norma yang muncul bukan hanya satu pertukaran saja tetapi dari beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan maka dari situlah muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial. Norma bersifat resiprokal, artinya isinya menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Jaringan yang terbina dan menjamin keuntungan, akan memunculkan norma keadilan dan yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras.

Menurut Andrain (1992), nilai-nilai itu memiliki enam ciri yaitu: bersifat umum dan abstrak, konsepsional mengandung kualitas moral, tidak selamanya realistik, bekerja dalam situasi kehidupan masyarakat yang nyata, nilai-nilai itu bersifat campuran dan bersifat stabil, dan sukar berubah. Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh

sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama. Norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial (Putnam, 1993).

Menurut Fukuyama (1999; 2005), norma adalah nilai bersama yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat atau kelompok. Modal sosial merupakan norma informal yang dapat mengembangkan kerjasama antar dua atau lebih individu. Norma yang merupakan modal sosial menentukan perilaku bersama dalam suatu kelompok individu juga dipahami sebagai prinsip keadilan yang mengarahkan pelaku untuk berperilaku yang tidak mementingkan diri sendiri yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan ke seharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). Oleh karena itu Adler dan Kwon (2000) menyatakan, dimensi modal sosial adalah merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 2000).

Menurut Cohen dan Prusak (2001), modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota

kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Sependapat dengan hal tersebut, Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), timbal balik, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya. Sedangkan Cox (2005) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Bank Dunia (2005) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Setiap kehidupan sosial senantiasa ditandai dengan adanya aturan-aturan pokok yang mengatur perilaku anggota-anggota masyarakat yang terdapat di dalam lingkungan sosial tersebut yang merupakan pola hubungan tertata yang meliputi: a) segala sesuatu yang menjadi dasar tujuan kehidupan sosial yang ideal atas berdasar pada pola-pola yang terbentuk di dalam realitas sosial tersebut; dan b) sesuatu yang menjadi pola pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial, yang di dalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan berikut sanksinya yang dinamakan sistem norma.

A. Literasi Ekonomi

Literasi dalam bahasa Inggris yaitu Literacy berasal dari bahasa Latin littera atau huruf yang artinya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang

menyertainya. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Peter Sina dalam Kompasiana edisi 01 Mei 2012 definisi Literasi menurut Collins Dictionary and Thesaurus bahwa literasi berarti kemampuan membaca, menulis, pendidikan, pembelajaran dan pengetahuan. Sumber lain, *The New American Webster Handy College Dictionary* bahwa literasi diartikan sebagai membaca dan ilmu pengetahuan. Selain itu, literasi juga berkaitan dengan pembelajaran. Menurut Matsuura (*Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation*) bahwa literasi tidak hanya menyangkut keahlian berpikir dan membaca melainkan menyangkut proses pembelajaran (*learning*) dan keahlian hidup (*life skill*) yang digunakan manusia, komunitas ataupun suatu bangsa untuk bertahan dan secara berkelanjutan mengalami perubahan. Dengan kata lain, tanpa literasi maka suatu bangsa atau komunitas akan kesulitan memastikan untuk tetap bertahan hidup selayaknya sebagai manusia (Peter Sina, 2012).

Menurut Mankiw (2006) ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Nopirin (2008) ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik secara individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa. Masalah dalam ekonomi adalah kelangkaan sumber daya relatif terhadap pemenuhan kebutuhan, sementara jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas. Dengan demikian, untuk mendapatkan kepuasan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas maka manusia harus melakukan pemilihan kebutuhan dengan cara mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien. Ilmu ekonomi membantu manusia untuk mencapai kemakmuran yang maksimal dari sumber-sumber atau alat-alat yang tersedia. Menurut Iskandar (2002) ilmu ekonomi

terbagi dalam dua bagian besar yang kelak akan menurunkan ilmu-ilmu ekonomi teori dan terapan, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro khususnya mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Aspek analisisnya antara lain analisa biaya/manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-model pasar, industri, teori harga dan teori produksi. Sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku masyarakat (negara/bangsa) dalam memenuhi kebutuhannya (masalah agregat). Aspek analisisnya antara lain pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesempatan kerja, inflasi, dan investasi.

Economic Literacy berasal dari bahasa Inggris, *Economic* berarti ilmu ekonomi sedangkan *Literacy* berarti “melek”, paham atau mengerti sehingga *economic literacy* dapat diartikan sebagai kemelekwacanaan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan baik berupa barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi terdapat konsep-konsep dasar ekonomi seperti masalah-masalah dasar ekonomi, kegiatan ekonomi maupun organisasi ekonomi.

Economic literacy atau yang lebih kita kenal dengan istilah “melek ekonomi”, mulai dianggap penting sejak akhir tahun 1990. Bahkan, di negara-negara maju dan berkembang *economic literacy* dianggap sangat penting untuk diketahui oleh warga negaranya. Pengetahuan tentang *economic literacy* disejajarkan dengan pentingnya “melek huruf” dan “melek teknologi”. Hal ini dilatarbelakangi adanya asumsi bahwa semua aspek kehidupan banyak berhubungan dengan masalah ekonomi.

Menurut Pandey & Bhattacharya (2012) melek ekonomi adalah kemampuan untuk menggunakan konsep ekonomi untuk membuat keputusan tentang penghasilan, tabungan, pengeluaran dan mengalokasikan uang. Hal ini diperjelas oleh pendapat dari *Organization for Economic Literacy (OEL)* yang menegaskan bahwa melek ekonomi tidak hanya meliputi pemahaman konsep dasar ekonomi dan fakta ekonomi, tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis yang mendukung cara berpikir ekonomi yang benar. Dengan kata lain, melek ekonomi melibatkan pengetahuan dan penerapan 19 teori-teori ekonomi yang mendasar dalam mengambil keputusan tentang sumber daya yang terbatas. Menurut Mathews (1999) literasi ekonomi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu agar dapat mengenali atau menggunakan konsep ekonomi dan cara berpikir ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Jappelli (2009) pada prinsipnya literasi ekonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan, hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi ekonomi yang tinggi sehingga mengkerucutkan peluang mencapai kesejahteraan. Salah satu indikatornya adalah menjadi orang yang cerdas dalam mengelola sumber daya ekonominya guna mencapai kesejahteraan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi ekonomi merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep dasar ekonomi dan cara berpikir kritis dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi di era modern ini, hal terutama adalah seseorang harus cerdas. Indikasinya dari kemampuan meracik sumberdaya yang dimiliki untuk menciptakan benefit. Untuk penciptaan nilai yang terkristalkan dalam perilaku dibutuhkan literasi ekonomi, karena pada prinsipnya literasi ekonomi merupakan alat yang berguna

untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Seperti bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan hidup. Membuat keputusan ekonomi yang cerdas adalah suatu pilihan, dan pilihan ini memerlukan upaya. Selain upaya maka individu juga perlu memahami syarat-syarat yang tepat guna membuat keputusan ekonomi sehari-hari. Terkait upaya dan persyaratan tersebut maka literasi ekonomi menjadi suatu pilihan yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang. Kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi ekonomi yang memadai guna membuat keputusan yang cerdas (Peter Sina, 2012).

Budiwati (2014), mengungkapkan bahwa Literasi ekonomi merupakan suatu konsep yang menjadi penting, karena dengan melek ekonomi berarti memiliki kecerdasan dalam melakukan tindakan ekonomi. Sesuai dengan prinsip efisiensi yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi, tingkat literasi ekonomi yang tinggi mengandung makna bertindak ekonomi (baik produksi, konsumsi maupun distribusi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Wulandari (2011) bahwa literasi ekonomi adalah ketrampilan hidup (*life skill*) yang harus dimiliki oleh siapa saja untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, literasi ekonomi dapat diaplikasikan untuk konteks individu maupun rumah tangga. Mathews (1999) bahwa manfaat mempelajari literasi ekonomi yakni memahami pengaruh inflasi pada nilai tukar uang, menjadi penabung, investor, serta menjadi investor yang lebih cerdas, dan yang terutama adalah bagaimana literasi ekonomi dapat memfasilitasi interaksi meningkatkan literasi ekonomi.

Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap konsumtif pada masyarakat. Indikasi lainnya dari rendahnya literasi ekonomi adalah banyak kasus dan korban penipuan berbalut investasi, termasuk kasus yang terakhir yakni kasus

Antaboga-Century. Fenomena lainnya adalah rendahnya spirit masyarakat Indonesia untuk menabung dan kebiasaan belanja yang berlebihan sehingga sulit untuk menjadi konsumen yang cerdas. Dengan menjadi konsumen yang takluk pada hasrat untuk berbelanja secara berlebihan hanya akan menjadikan siklus hidup menjadi semakin jauh dari pencapaian yang diharapkan. Pada prinsipnya literasi ekonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan, hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi ekonomi yang tinggi sehingga mengkerucutkan peluang mencapai kesejahteraan. Salah satu indikatornya adalah menjadi orang yang cerdas dalam mengelola sumber daya ekonominya guna mencapai kesejahteraan. Lebih jelasnya akan tampak dari pembedahan menggunakan perspektif seperti membangun aset, mengelola utang, menabung dan lain sebagainya (Jappelli, 2010). Dengan demikian, dapat diperas lagi bahwa pada prinsipnya keputusan ekonomi yang diambil bermaksud mengoptimalkan kemakmuran atau kesejahteraan individu maka pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang kompleks mengingat perlu mempertimbangkan situasi dan informasi secara cermat dengan cara melakukan analisis yang kritis, mendalam dan komprehensif.

Literasi ekonomi dapat membuat seseorang menjadi cerdas dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dengan cara mengaplikasikan konsep ekonomi tersebut. Selain itu, literasi ekonomi menjadi sangat penting untuk membuka pengetahuan tentang biaya/manfaat suatu barang dalam aktivitas ekonomi. Beberapa survei dilakukan untuk melihat tingkat melek (literasi) ekonomi, khususnya di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Survei yang dilakukan pada bulan September dan Oktober 1998 oleh *The Minnesota Center for Survey Research at the University of Minnesota*. Survei dilakukan dengan mengajukan 13 pertanyaan untuk menguji pengetahuan

yang terkait dengan konsep konsep ekonomi atau literasi ekonomi (Neti Budiwati, 2014). Hasil yang diperoleh dari tes ini adalah bahwa sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi (khususnya isu ekonomi mikro, seperti operasi pasar dan sumber-sumber pendapatan pribadi) dan memiliki dampak langsung terbesar pada kehidupan sehari-hari mereka, khususnya terkait isu-isu ekonomi mikro. Akan tetapi responden kurang memahami isu-isu ekonomi makro, seperti peran uang dan penyebab dan dampak inflasi yang ditunjukkan oleh data sekitar 54% responden tidak memahami hubungan antara uang dan defisit anggaran, serta 35% responden tidak memahami tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya yang terbatas (Neti Budiwati, 2014). Selain itu, di Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi, Louis Harris & Associates, Inc dengan Dewan Nasional Pendidikan Ekonomi (The National Council on Economic Education - NCEE) pada tahun 2005 mengembangkan Uji Melek Ekonomi. Penelitian ini dilakukan secara online dari 12 Januari-10 Februari 2005 dengan 3.512 orang 21 dewasa AS berusia 18 tahun ke atas dan 2.242 siswa AS kelas 9-12. Mereka menemukan bahwa orang dewasa mencetak rata-rata 57% pemahaman mereka tentang konsep dasar ekonomi dan siswa SMA mencetak rata-rata 48% (Markow & Bagnaschi, 2005). Sedangkan, Wood & Doyle (2002) melaporkan hasil survei terhadap 1.001 karyawan dari tujuh perusahaan besar yang dilakukan dalam rangka Business Roundtable sebagai bagian dari program kebijakan publik. Dengan menggunakan kuesioner yang sama yaitu The Standards in Economics Survey ditemukan bahwa skor rata-rata dari hasil tes literasi ekonomi karyawan adalah 67%. Instrumen The Standards in Economics Survey yang dikembangkan oleh NCEE, survei ini terdiri dari 20 pertanyaan yang menguji pengetahuan dasar tentang konsep-konsep

ekonomi. Versi online dari tes ini telah diambil alih 31.000 kali dengan skor rata-rata 80%. Uji reliabilitas dan validitas yang ini telah terbukti di lebih dari 10 tahun penggunaan dan ribuan responden (Albritton, 2006).

Hubungan Literasi Ekonomi dengan Perilaku Konsumen Perilaku konsumen ditentukan oleh tingkat pengetahuan masyarakat tentang ekonomi, sehingga literasi ekonomi menjadi hal penting. Literasi dalam perekonomian suatu negara menjadi penting, karena dengan literasi ekonomi berarti menunjukkan masyarakat suatu negara merupakan konsumen atau produsen yang cerdas, sehingga akan mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat yang cerdas akan mampu memilih produk yang dapat mendorong perekonomian negaranya, bukan memperkaya negara lain sebagaimana yang menjadi tujuan dari globalisasi. Terkait dengan perilaku konsumsi siswa, pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. Pendidikan merupakan suatu proses yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam perilaku. Dapat dikatakan bahwa orang dianggap belajar jika menunjukkan perubahan-perubahan tingkah laku dalam hidupnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki, manusia dapat bertindak atau berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dari proses pembelajaran termasuk dalam mengambil keputusan. Keputusan ekonomi yang cerdas terlihat dari kemampuan mencari sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan benefit. Hal ini diperjelas oleh Jappelli (2009) bahwa literasi ekonomi menjadi semakin penting untuk membuat keputusan rumah tangga, yaitu bagaimana berinvestasi yang tepat, berapa banyak meminjam yang tepat di pasar uang dan bagaimana memahami konsekuensi atas stabilitas keseluruhan ekonomi.

Menurut Salemi (2005) "Economic Literacy mean students attain economic lietracy if they can apply basic economic concepts years later, in situations relevant to their lives and different from those encountered in the classroom". Economic literacy merupakan hal yang sangat diperlukan karena setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari masalah ekonomi. Masalah utama di dalam ekonomi adalah masalah kelangkaan atau scarcity sehingga masyarakat harus memiliki strategi untuk dapat menentukan komoditi apa yang akan dibuat, bagaimana komoditi itu di buat dan untuk siapa komoditi itu dibuat. Sehingga dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat. Jika masyarakat telah melek ekonomi maka diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat baik sebagai konsumen, produsen, investor dan warga negara.

Forsyth (2006) menyatakan "The study of Economics assists individuals to identify, analyze and interpret the economic issues inherent in different context. The knowledge, skills and behaviour associated with the study of Economic enriches indivuduals and groups in their roles as consumers, producers, owners, employers, employees, savers, investors, volunteers, carers and voters". Stern as a President of Federal Reserve Bank of Minneapolis menyatakan "Economic Literacy is crucial because it is a measure of whether people understand the forces that significantly affect the quality of theirs lives". Sedangkan Duvall menyatakan "Economic literacy is a vital skill, just as vital reading literacy".

Di Amerika sosialisasi melek ekonomi dilakukan oleh NCEE (*The national Council on Economic Education*), dan Kriteria Economic literacy menurut NCEE (*The national Council on Economic Education*) tahun 2003 terdiri dari 20 indikator :

- Mampu menganalisis perubahan permintaan barang
- Mampu mengelola peran wirausaha

- Mampu menganalisis tingkat harga terhadap kecenderungan menabung
- Mampu mengalokasikan pendapatan individu
- Mampu mengalokasikan pendapatan nasional
- Mampu menganalisis perubahan penawaran dan permintaan
- Mampu menganalisis dampak kebijakan perdagangan internasional
- Mampu menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga
- Mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi, produsen, konsumen dalam pemerintahan dan perekonomian
- Mampu menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional
- Mampu menganalisis dampak perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga barang
- Mampu menjelaskan penggunaan sumber daya yang terbatas
- Mampu menjelaskan peran pasar modal dalam perekonomian
- Mampu menganalisis *cost* dan *benefit* dari transaksi ekonomi
- Mampu menganalisis *cost* dan *benefit* dari pengambilan keputusan
- Mampu menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian
- Mampu menjelaskan Anggaran Perencanaan Belanja Negara
- Mampu menganalisis dampak inflasi
- Mampu menganalisis pengembangan industri
- Mampu menjelaskan bunga uang.

D. Masyarakat Pesisir

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-prose alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan.

Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaen/kota.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir.

Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir.

Ciri khas wilayah pesisir jika ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan ekosistem yang khas. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Serta

kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir.

Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras dimana selalu diliputi oleh adanya ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM).

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, kearah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Wilayah ini merupakan tempat menumpuknya berbagai bahan baik berasal dari hulu atau setempat akibat berbagai macam aktifitas manusia. Oleh karena itu, dengan adanya pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara intensif, optimal dan terkendali dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi serta

dapat memberikan efek keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional dan belum dapat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sehingga pada saat ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat pesisir masih berada dibawah garis kemiskinan.

B. Penelitian Relevan

Risal M (2016) dengan judul: Melawan Kemiskinan Struktur (Studi Kasus Nelayan Mandar Di Desa Bonde Kabupaten Majene). Melalui studi kasus dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian masyarakat nelayan di desa Bonde Kabupaten Majene. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa Bonde, masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kondisi masyarakat nelayan di desa bonde memiliki perekonomian yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat nelayan di desa Bonde menyebabkan faktor lahirnya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktur terjadi oleh adanya faktor yakni adanya patron-klien dan perkembangan modernisasi. Bentuk strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa bonde yakni dengan mengurangi pola konsumsi kehidupan keluarga, bekerja di sektor yang lain secara kreatif sebagai bentuk melawan kemiskinan struktur.

Rosni (2017) dengan judul: Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Tingkat Kesejahteraan

Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan yang ada di Desa Daari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang berjumlah 443 KK. Sampel dalam penelitian ini adalah 15% dari jumlah populasi nelayan yaitu 66 KK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah daftar wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yaitu 42 responden (63,63%) tergolong dalam prasejahtera, 21 responden (31,81%) tergolong dalam sejahtera I, dan 3 responden (4,56%) tergolong dalam sejahtera II. Jika dikaitkan dengan Upah Minimum Kabupaten Batubara tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.313.625 maka seluruh responden masuk dalam kategori miskin, masyarakat prasejahtera pendapatannya Rp 897.000, masyarakat sejahtera I Rp 1.149.000, dan masyarakat sejahtera II Rp 1.470.000

Manggabarani I (2016) dengan judul: Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai (Studi Kasus Lingkungan Luwaor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene). Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kondisi sosial yang terdiri Aspek Pendidikan, aspek kergaman Pekerjaan Akses Kesehatan. nelayan yang bermukim di daerah pesisir pantai, (2) Untuk mengetahui kondisi ekonomi yang terdiri dari tingkat pendapatan usaha nelayan, Pendapatan diluar usaha Nelayan, pendapatan Keluarga nelayan pada masyarakat nelayan yang bermukim di daerah pesisir pantai. Temuan penelitian antara lain (1) Kondisi sosial masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai dilihat. Dari hasil persentase kajian sosial dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat dilihat dari yang memiliki pekerjaan sampingan sebanyak (51,11), Aspek pendidikan rata-rata tingkat pendidikan

responden, isteri dan anggota keluarganya adalah SD dengan persentase (86,67), (77,78), (71,42). Sedangkan Akses kesehatan: Akses Puskesmas jumlah persentase yang memanfaatkan puskesmas sebanyak 71,1. (2) Kondisi ekonomi masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan kepala rumahtangga, pendapatan isteri, dan pendapatan anggota rumahtangga masih sangat rendah. Yang rata-rata pendapatan pokok nelayan dalam 1 bulan sebesar Rp.724.450 pendapatan sampingan Rp.293.750, pendapatan isteri Rp.181.250 dan pendapatan anggota rumahtangga sebesar Rp.277.78.

Indarti I (2015) dengan judul: Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan. Menjelaskan bahwa: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan yang berkelanjutan. Selain itu bertujuan menemukan model dalam rangka mengurai lingkaran kemiskinan di wilayah pesisir kota Semarang. Responden dalam penelitian ini adalah nelayan di wilayah pesisir kota Semarang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) langsung kepada nelayan, juragan dan bakul ikan. Hasil penyebaran questioner kemudian dianalisa secara deskriptif serta SWOT Matrix. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen koperasi dikelola apa adanya, cenderung statis, tidak maksimal dilingkungan sumber daya yang melimpah. Koperasi tidak mampu sebagai motor penggerak perekonomian, motivasi anggota koperasi untuk berkembang sangat rendah, cenderung masa bodoh. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mengurai lingkaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Semarang.

Pontoh O (2010) dengan judul: Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. Penulis menggambarkan bahwa terdapat beberapa literatur yang mengemukakan bahwa modal manusia, modal sumberdaya alam dan modal ekonomi produktif. Disimpulkan bahwa ketidakberhasilan atau masih rendahnya kinerja pembangunan hingga kini dikarenakan pemerintah seringkali mengabaikan sistem sosial masyarakat yang menjadi obyek pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan metode eksploratif dan deskriptif. Tujuannya adalah untuk menampilkan gambaran pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan studi kasus dipilih guna mempelajari organisasi sosial ekonomi dan variabel atau aspek terkait lainnya lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan di Desa Gangga Dua, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian dan pengambilan data dilakukan selama bulan Juli sampai Agustus 2007. Tulisan ini memaparkan hasil dari suatu penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran tentang identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Penggambaran modal sosial dilakukan melalui kajian sosial budaya masyarakat nelayan di Desa Gangga Dua, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan masyarakat nelayan yang menghadapi ancaman menipisnya sumber-daya perikanan di perairan operasionalnya. Data dan informasi yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan pengertian-pengertian yang dikembangkan untuk setiap faktor yang dikaji, yaitu: (a) nilai dan norma masyarakat lokal, (b) kepercayaan lokal; (c) pola dan sistem produksi dan reproduksi, dan (d) politik lokal. Penelitian ini dilakukan di Desa Gangga Dua, Kabupaten Minahasa Utara. Penulis mengidentifikasi karakter sosial budaya masyarakat nelayan. Dalam menganalisis karakter sosial budaya masyarakat nelayan penulis melalui empat

faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) faktor nilai dan norma masyarakat, (2) faktor kepercayaan dan organisasi lokal, (3) faktor pola dan sistem produksi dan reproduksi, dan (4) faktor politik lokal.

Rustanto B (2007) dengan judul: Penguatan Keluarga Miskin melalui Penguatan Modal Sosial. Artikel ini menyampaikan pokok pemikiran mengenai kemiskinan yang terjadi pada keluarga yang dapat diatasi melalui penguatan modal sosial. Penulis menyampaikan bahwa perlu berhati-hati dalam menentukan ukuran objektif untuk mengkaji kemiskinan, karena ukuran obyektif kemiskinan sangat bervariasi. Kebutuhan manusia tidak hanya diukur secara ekonomi semata. Maka pada penentuan garis kemiskinan yang direduksi dari aspek ekonomi semata tidak akan memberikan pemecahan pada persoalan dimensi lainnya seperti budaya dan politik. Penulis lebih menekankan bahwa modal sosial adalah berupa jaringan sosial, atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan, kewajiban serta norma pertukaran. Kemudian jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan. Unsur (variabel) modal sosial yang dilihat penulis adalah: (1) interaksi dalam kelompok, (2) jaringan sosial, (3) perasaan empati dan (4) norma yang terdapat dalam masyarakat.

Kamarni Neng (2012) dengan judul: Analisis Modal Sosial sebagai Salah Satu Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang). Penulis menitikberatkan jaringan sosial sebagai bagian modal sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan. Variabel modal sosial yang digunakan oleh penulis adalah: (1) persatuan kelompok: terdapat hubungan persatuan kelompok dengan kesejahteraan rumah tangga, (2) adat istiadat: dari hasil penelitian diungkapkan bahwa tidak terdapat relasi antara adat

istiadat dengan kesejahteraan rumah tangga (tidak dapat diputuskan), (3) trust dan (4) partisipasi: dalam partisipasi dan trust dapat dilihat bahwa semakin luas interaksi (bentuk partisipasi) rumah tangga dalam persatuan kelompok maka semakin tinggi kesejahteraan. Variabel yang paling erat hubungannya dengan kesejahteraan keluarga adalah variabel persatuan kelompok. Dari hasil pengujian hipotesa dapat disimpulkan kepemilikan tanah dan penghasilan rumah tangga memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan rumah tangga. Tanah dikelola dengan baik dapat menjadi investasi yang dapat mempengaruhi atau menambah pendapatan seseorang atau rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan konsumsi seseorang atau rumah tangga. Keikutsertaan dalam persatuan/lembaga masyarakat miskin Kelurahan Lubuk Minturun tergolong masih rendah dengan tingkat pencapaian 41,9%. Rendahnya keikutsertaan rumah tangga miskin dalam persatuan kelembagaan disebabkan rendahnya pendidikan responden dan kurangnya pengetahuan tentang fungsi suatu bentuk persatuan/kelembagaan yang merupakan salah satu kekuatan masyarakat untuk mau bersatu dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aliran modal rumah tangga miskin tergolong sangat rendah. Akses rumah tangga untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan sangat minim. Dari uji hipotesa dapat disimpulkan lembaga persatuan dalam masyarakat mempunyai peranan dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat kelurahan yang diprosikan dengan pengeluaran rumah tangga, karena faktor ini merupakan tingkat kemajuan manusia dalam menguasai alam dan lingkungannya. Namun dilihat dari tingkat pencapaian kesejahteraannya, masih rendah. Modal sosial yang lemah mengundang munculnya pertentangan nilai dan menonjolnya rasa saling tidak percaya. Akan tetapi bila modal

sosial yang tidak dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), bisa berakibat perhatian terhadap pentingnya kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat menjadi terabaikan. Modal sosial dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, tidak sekedar jumlah tetapi kehidupan masyarakat yang lebih berarti. Dengan dimensi yang ada dalam modal sosial, persatuan, budaya/adat istiadat, kepercayaan dan partisipasi.

Tanah dikelola dengan baik dapat menjadi investasi yang dapat mempengaruhi atau menambah pendapatan seseorang atau rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan konsumsi seseorang atau rumah tangga.

Inayah (2012) dengan judul: Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Penulis menjabarkan peranan modal sosial dalam pembangunan. Artikel jurnal ini membahas konsep modal sosial dan peranannya terhadap pembangunan. Kajian modal sosial mampu didefinisikan kembali oleh penulis dengan menyimpulkan definisi dari para ahli. Variabel yang terdapat dalam konsep modal sosial sesuai dengan penjabar penulis menurut para ahli adalah: (1) interaksi (dapat sampai kepada hubungan timbal balik), (2) kepercayaan, (3) jaringan dan (4) nilai dan norma yang membentuk struktur masyarakat. Sesuai dengan tujuan bahasannya penulis mampu menjabarkan peranan modal sosial dalam berbagai konteks pembangunan yaitu: (1) pembangunan manusia, (2) pembangunan sosial, (3) pembangunan ekonomi, dan (4) pembangunan politik. Keempat konteks peranan modal sosial tersebut dapat mengarahkan peneliti lain untuk meneliti modal sosial dalam pembangunan masyarakat.

Jocom S. G (2015) dengan judul: Keterkaitan Antara Modal Sosial Dan Kemiskinan Menurut Tahapan Perkembangan Desa Di Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor yang berkaitan dengan kemiskinan kawasan perdesaan di Provinsi Gorontalo adalah modal manusia yang direpresentasikan dengan umur, pendidikan kepala keluarga dan jumlah tanggungan kepala keluarga, modal fisik yaitu akses terhadap energi listrik (PLN) dan akses terhadap telekomunikasi, modal finansial berupa kepemilikan modal fisik, modal sumberdaya alam yaitu domisili dekat hutan serta modal sosial yang di proxy dengan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan jumlah jam kerja (2) komponen dominan yang membentuk modal sosial di perdesaan Gorontalo adalah rasa percaya (3) komponen atau dimensi yang memiliki keterkaitan dengan kemiskinan di perdesaan Gorontalo adalah norma, jaringan dan interaksi rasa percaya dan jaringan (4) desa-desa yang memiliki taraf perkembangan yang lebih maju dicirikan dengan keragaman bentuk-bentuk modal sosial yang berpengaruh dalam pengurangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Variabel yang terdapat dalam konsep modal sosial menurut para ahli adalah: (1) interaksi (dapat sampai kepada hubungan timbal balik), (2) kepercayaan, (3) jaringan dan (4) nilai dan norma yang membentuk struktur masyarakat.

Suandi (2007) dengan judul: Modal Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan mengkaji tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga di daerah perdesaan Provinsi Jambi, (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, (3) mengkaji perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga

berdasarkan wilayah agroekologi, (4) menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, dan (5) menghasilkan model pemberdayaan keluarga di daerah perdesaan. Penelitian dilakukan di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi dengan jumlah sampel penelitian 325 keluarga atau 10% dari populasi (3.257 Keluarga). Data analisis melalui model Structural Equation Modelling (SEM). SEM merupakan gabungan dari model regresi dan analisis alur (path analysis). Di dalam hasil identifikasi tingkat kesejahteraan menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga (objektif dan subjektif) di daerah penelitian tergolong sejahtera. Tingkat kesejahteraan di wilayah pegunungan merata dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan di wilayah pesisir pantai. Pengujian melalui model SEM menunjukkan pengaruh positif (baik secara langsung maupun tak langsung) variabel modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat modal sosial yang dimiliki oleh keluarga maka tingkat kesejahteraan keluarga tersebut semakin baik. Tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi objektif keluarga sebagian besar dipengaruhi oleh faktor modal sosial terutama adalah faktor partisipasi keluarga dalam asosiasi lokal, manfaat asosiasi lokal dan kepercayaan masyarakat masing-masing berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi objektif.

Bondan Satriawan dan Henny Oktavianti (2012) dengan judul: Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis berbagai penyebab kemiskinan pada petani, sehingga melalui analisis pertama tersebut akan dapat diketahui mengapa petani –sebagai salah satu aktor penyedia kebutuhan pangan– masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan yang kedua, melalui studi ini akan diketahui bagaimana sistem kelembagaan pertanian yang

berlangsung selama ini. Penelitian menggunakan metode ZOPP (metode perencanaan proyek yang berorientasi tujuan) yang bersifat partisipatif, maka perlu melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang diperlukan untuk memperoleh data dan informasi secara akurat di lapangan. Penelitian menggunakan teknik-teknik partisipatif untuk menemukan akar penyebab masalah kemiskinan pada petani. Penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengkaji permasalahan petani dan kemiskinan pada petani.

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat modal sosial yang dimiliki oleh keluarga maka tingkat kesejahteraan keluarga tersebut semakin baik.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan petani dilatarbelakangi oleh banyak hal, antara lain: kemampuan investasi petani yang rendah, ketergantungan petani, ketergantungan dana, dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga petani. Berdasarkan program-program yang telah disusun dan dianalisis maka dikemukakan matrik pemilihan program oleh masyarakat. Program-program tersebut adalah: (1) program penciptaan pasar bagi petani, (2) program pembentukan/ pengaktifan KUT/Gapoktan, (3) pendampingan KUT/Gapoktan yang dapat diimplementasikan dengan adanya pelatihan manajemen organisasi serta kemampuan menjalankan fungsi eksternal (networking), dan (4) pengadaan lahan percontohan di masing-masing desa. Satu individu masyarakat secara alami akan cenderung memilih melakukan aksi bersama dengan individu lain ketika mereka merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan ketika merasa ada ketidakpastian serta resiko yang dihadapi jika bergerak sendirian. Dengan demikian, transformasi

modal sosial ke dalam tindakan kolektif menjadi bermanfaat sebagai faktor penting untuk mempengaruhi dan menentukan bentuk keputusan dasar.

Sri Nurhayati Qodriyatun (2013) dengan judul: *Enhancement of Coastal Community Welfare in Batam Through Community Empowerment*. Menjelaskan bahwa: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Kota Batam ternyata telah memarginalkan masyarakat setempat, yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah-daerah pesisir (hinterland). Mereka hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan yang dilakukan kurang berhasil karena Pemerintah Kota Batam lebih banyak memberikan modal usaha dalam memberdayakan masyarakat. Tetapi kurang dalam mengamankan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Bagi masyarakat pesisir, sumber daya alam pesisir adalah aset. Oleh karenanya, ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk memberdayakan mereka, yaitu melakukan pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan memberikan modal untuk usaha.

Panuntun, Tryo Dinda, Moh. Aris Munandar, Eko Handoyo (2013) dengan judul: *Peranan KUD Karya Mina Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kota Tegal*. Mengungkapkan bahwa: Kota Tegal merupakan salah satu daerah pesisir di Jawa Tengah yang mempunyai potensi perikanan laut yang baik, namun dari potensi kekayaan alam tersebut belum dapat mensejahterakan masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan. Mayoritas nelayan Kota Tegal bermukim di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Nelayan di Kelurahan Muarareja mayoritas nelayan kecil, permasalahan yang dihadapi nelayan di sana adalah kurangnya

permodalan, minimnya fasilitas perikanan dan pemasaran hasil tangkapan. Penelitian ini mengkaji (1) peranan KUD Karya Mina dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan nelayan pada umumnya; (2) hambatan-hambatan yang dihadapi KUD Karya Mina dan; (3) upaya yang dilakukan KUD Karya Mina dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Subjek yang diteliti adalah pengurus, anggota KUD Karya Mina dan nelayan bukan anggota. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) observasi; (2) dokumentasi; dan (3) wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Digunakan teknik pemeriksaan lapangan dengan triangulasi untuk membuktikan keabsahan data. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan KUD Karya Mina antara lain memberikan pinjaman modal bagi nelayan yang membutuhkan, pengadaan solar bersubsidi bagi nelayan, menyediakan fasilitas-fasilitas perikanan serta kegiatan dibidang sosial. Hambatan yang dihadapi KUD antara lain tingkat partisipasi anggota yang rendah, kredit macet, pengetahuan pengurus, pengawas dan manajer KUD yang masih rendah mengenai peraturan-peraturan dan hambatan yang muncul dari luar KUD seperti kompetitor. Upaya yang dilakukan KUD Karya Mina dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui pembentukan kelompok-kelompok nelayan, mengerahkan karyawan untuk menagih kredit macet, mengikutkan pengurus, pengawas dan manajer dalam pelatihan, pendidikan dan sosialisasi serta bekerjasama dengan pemerintah dan pihak ketiga

Qoriah Saleha (2010) dengan judul: Profil Aktivitas Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Profile of Economic Activity and Welfare of Fisherman Society at Pela Village of Kutai Kartanegara Regency). Menjelaskan bahwa: Profil aktifitas ekonomi

masyarakat nelayan di Desa Pela meliputi aktifitas dibidang perikanan (tangkap, budidaya karamba, pengolah ikan asin, pedagang pengumpul dan pembuat alat tangkap) maupun non perikanan (usaha perdagangan, petani sawah dan kebun, perternakan, kerajinan anyaman, taxi kapal/ces, dan guru TPA). Umumnya mereka melakukan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Semayang menunjukkan hasil bahwa berdasarkan indikator BKKBN umumnya responden termasuk kategori miskin sedangkan indikator garis kemiskinan Sajogyo dan indikator BPS umumnya responden termasuk kategori tidak miskin. Hal ini terjadi karena ke tiga indikator ini menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu sosial dan ekonomi.

Ali Imron HS (2012) dengan judul: Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) Kehidupan masyarakat nelayan Tanggulsari kecamatan Tugu Kota Semarang 2) Problematika yang dihadapi oleh masyarakat nelayan Tanggulsari untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dan upaya-upaya yang dilakukan guna menangani problematika tersebut. 3) Rumusan strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam menghadapi perubahan iklim. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang telah diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan dianalisis secara diskriptif kualitatif guna menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat nelayan Tanggulsari dalam beradaptasi lingkungan, tingkat kesejahteraan, aktifitas sosial, aktifitas ekonomi, gaya hidup, problematika kehidupan, dan ketahanan hidup mereka. Simpulan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Kehidupan masyarakat nelayan

Tanggulsari dapat dilihat dari berbagai aspek: 1) Masyarakat nelayan Tanggulsari memiliki solidaritas yang tinggi. 2) Kehidupan keagamaannya tidak seberapa berkualitas. Tingkat pemahaman dan pengamalan keagamaannya beda satu sama lainnya. 3) Para nelayan Tanggulsari masih rendah tingkat pengetahuan kelautannya, terbatas kepemilikan modal, serta masih rendah manajemen usaha perikanan. 2. Problematika yang dihadapi oleh masyarakat nelayan Tanggulsari untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, di antaranya adalah: 1) Masyarakat kurang memperhatikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 2) Biaya produksi untuk melaut sangat tinggi. 3) Keterbatasan dan lemahnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan usaha yang murah. 4) Rendahnya pengetahuan kelautan, manajemen, dan budi daya tangkapan hasil laut. 5) Rusaknya lingkungan wilayah kawasan tangkapan ikan. 3. Rumusan strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan Tanggulsari Mangunharjo dapat dilakukan melalui: 1) Diupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 2) Diupayakan adanya pengurangan beban biaya akses pendidikan dan kesehatan. 3) Strategi peningkatan kepedulian dan kerjasama stakeholder dalam membantu pemberdayaan masyarakat nelayan Tanggulsari. 4) Strategi peningkatan kerjasama kelompok yang berbasis pada bidang usaha sejenis.

Yenida, Elni (2016) dengan judul: Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di wilayah Pesisir Pantai Sumatera Barat. Mengungkapkan bahwa: Wilayah pesisir pantai dikenal sebagai kawasan masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang. Kondisi ini sangat ironis apabila dibandingkan dengan keadaan alam wilayah pesisir yang kaya akan sumberdaya alam dan potensial dikembangkan secara ekonomi. Menurut

Siahaan (Islamy dkk., 2004) di daerah pesisir, umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang sangat kronis. Yaitu kemiskinan yang ditimbulkan akibat adanya tekanan ekonomi dan eksploitasi dari kelompok masyarakat, sehingga nelayan miskin tetap menjadi sangat "marginal". Pada umumnya masyarakat yang berada di sekitar pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sebenarnya banyak hal yang bisa di kembangkan dan di berdayakan, sehingga daerah di pesisir pantai bukan lagi menjadi daerah miskin. Untuk itu pemerintah sudah banyak memberikan program pemberdayaan namun belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Penelitian ini mengkaji keefektifan program pemberdayaan yang sudah di berikan pemerintah sehingga menghasilkan metode yang tepat untuk pemberdayaan pada masyarakat di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program pemerintah terkait dengan pemberdayaan masyarakat nelayan sudah efektif , karena dengan adanya bantuan alat atau program pemerintah adanya peningkatan dari hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, berarti adanya perbedaan sebelum dan sesudah adanya bantuan alat atau program dari pemerintah

Edwin Wantah (2017) dengan judul: Pemberdayaan Nelayan Berbasis Pendidikan Ekonomi Dan Potensi Pesisir Di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis kebutuhan pemberdayaan nelayan tradisional pesisir di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara berbasis pada pendidikan ekonomi dan potensi pesisir. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survey, observasi lapangan, wawancara dan Fokus Group Discussion (FGD). Subjek penelitian adalah nelayan pesisir Minahasa Utara berjumlah 40 orang nelayan yang tersebar pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Kema Dan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa

Utara Yang memiliki kapasitas tangkap 5 Gross Ton ke bawah. Hasil analisis kebutuhan di identifikasi dalam observasi, wawancara mendalam serta Fokus group Discussion yang di konfirmasi dengan hasil survey menunjukkan 85% nelayan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik, sikap dan prinsi-prinsip menjadi seorang wirausahawan sukses yang dapat di implementasikan dalam aktifitas usaha produktif di pesisir, 90% membutuhkan pengetahuan mengenai diversifikasi usaha yang berbasis pada potensi pesisir dan laut (usaha alternatif nelayan), 90% menyatakan bahwa mereka membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengolahan produk olahan ikan sebagai potensi pesisir dan laut, karena bahan baku yang melimpah, 80% menyatakan membutuhkan literasi mengenai bagaimana membangun kemitraan usaha dan jejaring usaha dengan kelompok usaha yang lain, 90% menyatakan bahwa mereka membutuhkan literasi mengenai pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan serta bagaimana mengembangkan kelompok usaha tersebut. 92, 5% Nelayan membutuhkan literasi mengenai modal usaha dan tatacara mengakses modal usaha dan 85% menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pengetahuan mengelolah uang, merencanakan pengalokasian keuangan dan tata cara menabung yang benar

Neti Budiwati (2014) dengan judul: Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Literasi Ekonomi (Studi pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri Kota Bandung. Penulis mendeskripsikan bahwa Literasi ekonomi merupakan suatu konsep yang menjadi penting, karena dengan melek ekonomi berarti memiliki kecerdasan dalam melakukan tindakan ekonomi. Sesuai dengan prinsip efisiensi yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi, tingkat literasi ekonomi yang tinggi mengandung makna bertindak ekonomi (baik produksi, konsumsi maupun

distribusi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Pengembangan model pembelajaran ekonomi beserta perangkat pembelajaran berbasis literasi ekonomi merupakan bagian yang harus dikembangkan agar tingkat literasi ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, sesuai dengan tujuan dari pendidikan ekonomi yaitu melahirkan peserta didik (masyarakat) yang rasional dalam melakukan tindakan ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian R & D, dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu tingkat literasi ekonomi peserta didik dan desain pembelajaran ekonomi yang telah berjalan, kemudian dicari kelemahan dan kekuatan dari pembelajaran yang selama ini telah berjalan. Kelemahan dan kekuatan tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan model pembelajaran yang cocok dalam pembentukan literasi ekonomi peserta didik, yang selanjutnya dikembangkan perangkat pembelajaran berbasis literasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan guru umumnya masih mengandung banyak kelemahan, khususnya dilihat dari model dan metode pembelajaran yang rata-rata sama untuk semua materi ajar, dan pembelajaran hanya menekankan pada kegiatan tatap muka yang bersifat tekstual dan mengejar target materi ajar harus selesai. Mengingat tingkat literasi ekonomi siswa, maka dipandang perlu untuk mengembangkan model pembelajaran ekonomi berbasis literasi ekonomi. Model yang diusulkan adalah model pembelajaran kontekstual berbasis masalah.

Peter Garlans Sina (2012) dengan judul: Analisis Literasi Ekonomi. Tulisan ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan literasi ekonomi bagi individu maupun rumah tangga yang menginginkan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kewajiban meningkatkan literasi ekonomi perlu dilakukan secara terencana dan diawali dari niat untuk belajar meningkatkan literasi ekonomi karena dapat berefek pada akumulasi aset,

pengelolaan utang yang tepat, proteksi, meningkatkan tabungan dan cerdas mengelola pengeluaran.

Lilik Sri Hariani (2015) dengan judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Ekonomi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi terhadap literasi ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang.

Penelitian dilakukan dengan metode survei. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap literasi ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Sedangkan secara parsial pembelajaran ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, kecerdasan spiritual dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap literasi ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, tetapi pengaruh tersebut bersifat negatif, artinya jika kecerdasan spiritual dan motivasi berprestasi meningkat maka literasi ekonomi mahasiswa menurun.

Wasak M. (2012) dengan judul: Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Mendeskripsikan penduduk desa Kinabuhutan tercatat 1.089 jiwa di mana 90% beragama islam, berpendidikan formal tamat SD, dan sebagian besar (78,55%) bermatapencaharian sebagai nelayan, dengan menggunakan alat tangkap soma pajeko, pukat pantai dan pancing, di mana sekitar 51% nelayan berpendapatan

Rp. 610.000 - Rp 800.000 per bulan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. Organisasi sosial dan ekonomi dapat bermanfaat dalam peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat di desa ini.

pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap literasi ekonomi

Deshinta Vibriyanti (2014) dengan judul: Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah. Mendeskripsikan bahwa Kota Tegal memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dengan sumberdaya laut, SDM dan infrastruktur yang memadai. Akan tetapi data menunjukkan bahwa produksi perikanan laut di kota Tegal mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk dan terjadinya overfishing di wilayah penangkapan utara pulau Jawa. Kondisi ini berdampak terhadap pendapatan nelayan yang tidak menentu, khususnya bagi nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan nelayan tangkap melalui berbagai program. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi dan bentuk pemberdayaan bagi nelayan tangkap, khususnya nelayan tradisional di Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, fokus group discussion, observasi dan studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap di kota Tegal memiliki potensi yang besar sebagai penggerak perekonomian masyarakat lokal. Hal ini terbukti dari tumbuhnya industri-industri pengolahan ikan seperti

industri fillet yang banyak menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan. Hanya saja program-program pemberdayaan yang diberikan pemerintah masih menemui beberapa kendala di lapangan, terutama dalam hal pemerataan akses baik terhadap program yang berdimensi fisik maupun nonfisik. Pendekatan kelompok merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi nelayan dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong nelayan untuk tergabung dalam kelompok-kelompok sehingga memudahkan pemetaan dan intervensi program. Pendampingan terhadap kelompok-kelompok nelayan juga dirasa perlu, khususnya bagi nelayan tradisional yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Ayu Diah Amalia (2015) dengan judul: *Modal Sosial Dan Kemiskinan (Social Capital And Poverty)*. Menjelaskan bahwa masalah kemiskinan tetap menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan dan dicarikan penyelesaiannya. Berbagai strategi dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, salah satu strategi mungkin adalah dengan peningkatan modal sosial kelompok miskin. Tulisan ini merupakan kajian teori dan kajian literatur mengenai modal sosial dan kaitannya dengan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian beberapa literature dan konsep-konsep sebaiknya modal sosial banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan kaitannya dengan konsep Katherine Rankin, bahwa daya tarik modal sosial terletak pada kapasitasnya untuk memobilisasi jaringan sosial lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan misalnya program pendanaan mikro. Modal sosial lebih menekankan kepada kebersamaan dan energi sosial dalam suatu masyarakat. Modal sosial merupakan kekuatan yang membentuk suatu jaringan sosial sesama kaum miskin untuk bahu membahu mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan

solidaritas sosial untuk mengatasi keterbatasan modal material. Sebagaimana yang telah dikemukakan Chambers bahwa salah satu dimensi kemiskinan adalah dimensi hubungan sosial, dalam hubungan sosial terkandung modal sosial. Alternative pengurangan kemiskinan salah satunya dapat diatasi dengan memanfaatkan modal sosial pada kelompok miskin sebagai energy dan atau kapasitas melalui peningkatan dan pemanfaatan jejaring (networks) untuk membentuk kelompok usaha bersama yang produktif guna meningkatkan penghasilan kelompok miskin yang pada akhirnya terjadi kesejahteraan akan terwujud.

pemerintah perlu mendorong nelayan untuk bergabung dalam kelompok-kelompok sehingga memudahkan pemetaan dan intervensi program. Pendampingan terhadap kelompok-kelompok nelayan juga dirasa perlu, khususnya bagi nelayan tradisional yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah

Prasetyo P. E dan Siti Maisaroh (2009) dengan judul: Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan telah mengubah konsep pembangunan ekonomi dan sosial yang sekaligus mampu menjelaskan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi dasar ekonomi mikro yang produktif-kreatif karena didasari oleh sumber daya warga miskin yang kreatif. Pemberdayaan menjadi kata kunci dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan sebagai model strategis pengentasan kemiskinan maka ia harus menjadi proses memobilisasi berbagai aspek atau unsur sumber daya serta kapasitas dan potensi masyarakat yang bersangkutan, sehingga pemberdayaan tidak hanya sesuatu teoritis melainkan dapat menjadi alat terbaik

sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa model strategi pemberdayaan ekonomi industri kerajinan rakyat dapat menjadi pilar utam peningkatan kesejahteraan pengrajin yang berarti dapat mengurangi kemiskinan masyarakat.

BAB III.
TUJUAN, MANFAAT
DAN URGENSI

A. Tujuan

Tulisan dalam buku ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh literasi ekonomi dan modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh literasi ekonomi dan modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
4. Mendeskripsikan kemiskinan dalam perspektif modal sosial dan literasi ekonomi

B. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam tulisan ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara empiris dalam bidang kajian kemiskinan dan ekonomi, terutama dalam menjelaskan dan memahami model pengentasan kemiskinan dengan konsep literasi ekonomi dan modal sosial.
2. Bidang kajian ilmiah, yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian-penelitian ilmiah yang akan dilakukan di masa depan dan memperkaya wawasan dalam pengembangan ilmu, khususnya mengenai permodelan pengentasan kemiskinan melalui literasi ekonomi dan modal sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat pesisir itu sendiri mengenai pentingnya pengembangan Ilmu ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan serta kecakapan ekonomi dan implementasi modal sosial

dalam menjelaskan perannya dalam pengentasan kemiskinan, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih optimal.

4. Bahan rekomendasi bagi institusi pendidikan dan pelaku usaha dalam berkontribusi dalam penganatasan kemiskinan khususnya pada masyarakat pesisir.

C. Urgensi

Urgensi penelitian ini didasarkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah kemiskinan merupakan indikator utama ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.
2. Konsep pembangunan (berbasis masyarakat) yang dikemukakan oleh Hasbullah (2006) diketahui bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat perlu dilihat dari beberapa modal komunitas (*community capital*) yang terdiri dari: (a) Modal Manusia (*human capital*) berupa kemampuan personal seperti pendidikan, pengetahuan, kesehatan, keahlian dan keadaan terkait lainnya; (b) Modal Sumberdaya Alam (*natural capital*) seperti perairan laut; (c) Modal Ekonomi Produktif (*produced economic capital*) berupa aset ekonomi dan finansial serta aset lainnya; dan (d) Modal Sosial (*sosial capital*) berupa norma/nilai (*trust, reciprocity*, norma sosial lainnya), partisipasi dalam jaringan, *pro-activity*.

Masalah kemiskinan merupakan indikator utama ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

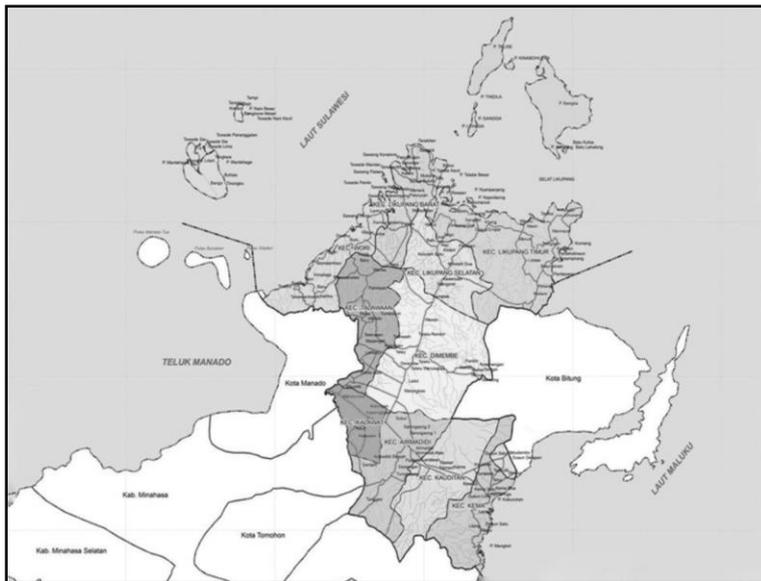
Beberapa studi mengemukakan bahwa modal manusia, modal sumberdaya alam dan modal ekonomi produktif sudah banyak digarap oleh pemerintah, namun tidak demikian halnya dengan modal sosial yang selama ini masih banyak diabaikan (Cernea, 1988; Hasbullah, 2006; Jamasy, 2004).

3. Tulisan dalam buku ini merupakan gambaran temuan penelitian yang didasarkan pada pertimbangan rencana strategis (Renstra) Universitas Negeri Manado 2016-2020 yang berkenaan dengan program peningkatan mutu kinerja kelembagaan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan aktivitas instruksional, dengan sasaran pencapaian: 1) Peningkatan kemampuan daya saing usulan dan produk penelitian inovatif dan pengabdian pada masyarakat di berbagai jenis penelitian baik ditingkat nasional maupun internasional; 2) Menghasilkan penelitian-penelitian inovatif dan memperoleh pengakuan HKI; 3) Peningkatan usaha-usaha transfer teknologi melalui difusi teknologi dimasyarakat; dan 4) Peningkatan mutu dan produktivitas karya-karya ilmiah baik hasil penelitian, pengabdian pada masyarakat, penulisan buku teks, bahan ajar dan modul.

Beberapa studi mengemukakan bahwa modal manusia, modal sumberdaya alam dan modal ekonomi produktif sudah banyak digarap oleh pemerintah, namun tidak demikian halnya dengan modal sosial yang selama ini masih banyak diabaikan

**BAB IV.
METODE DAN
PEMBAHASAN**

A. Deskripsi



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Minahasa Utara (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018)

Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Minahasa yang terbentuk pada tahun 2004 dengan ibukota di Airmadidi. Kabupaten Minahasa Utara terletak pada $1^{\circ}18'30''$ - $1^{\circ}53'00''$ LU dan $124^{\circ}44'00''$ - $125^{\circ}11'00''$ BT dengan luas wilayah sebesar 1.059,24 km². Minahasa Utara berada di wilayah yang strategis, terletak antara Kota Manado yang memiliki bandara utama dan Kota Bitung yang memiliki pelabuhan laut utama di Sulawesi Utara. Batas-batasnya meliputi, Utara : Laut Sulawesi dan Laut Maluku; Selatan : Kab. Minahasa Barat : Kota Manado; Timur : Kota Bitung. Minahasa Utara terdiri dari enam daerah kepulauan yang terdapat di tiga kecamatan, yaitu Mantehage dan Nain di Kecamatan Wori; Gangga, Talise, dan Kinabuhutan di Kecamatan Likupang Barat; dan Bangka di Kecamatan Likupang

Timur. Pada tahun 2017, suhu rata-rata di Minahasa Utara sekitar 27,01°C dari 26,7 °C di tahun 2016, dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,77 Knot. Jumlah hari hujan selama setahun cukup tinggi, yaitu mencapai 304 hari dengan rata-rata curah hujan 357,4 mm³ dan kelembaban udara rata-rata mencapai 86,25 persen lebih tinggi dari tahun 2016 sebanyak 261 hari dengan rata-rata curah hujan 150,6 mm³ dan kelembaban udara rata-rata mencapai 75,83 persen (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

Jumlah wilayah Administrasi Kecamatan di Minahasa Utara tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 10 Kecamatan dengan ibukotanya terletak di Kecamatan Airmadidi. Begitu juga dengan jumlah desa/kelurahan yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 dengan jumlah 131 Desa/Kelurahan (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

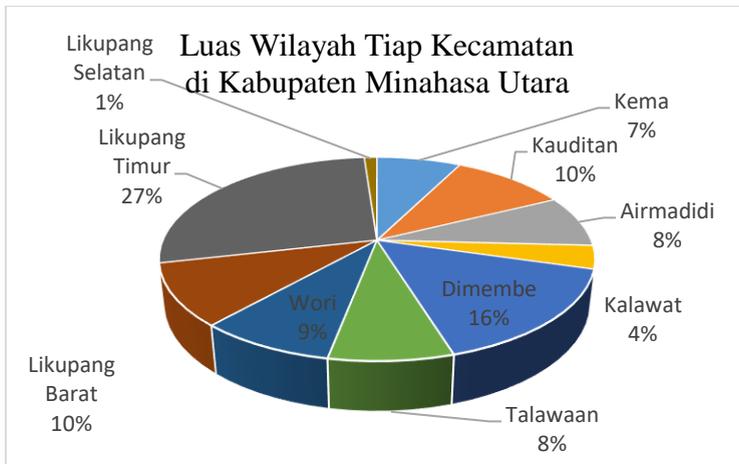
Penduduk Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 200.985 jiwa yang terdiri atas 102.127 jiwa penduduk laki-laki dan 98.858 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Minahasa Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,75 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Talawaan dan Kalawat. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk pada tahun 2017 maka kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2017 mencapai 189,74 jiwa/km². Dari gambar piramida penduduk disamping, terlihat tingkat kelahiran yang masih tinggi. Hal ini diindikasikan persentase penduduk (0-4) tahun yang lebih tinggi dari penduduk (5-9) tahun. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan ditunjukkan oleh nilai sex rasio. Nilai sex rasio tahun 2017 mencapai 103,31 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 3,31 persen daripada penduduk perempuan. Komposisi penduduk Minahasa Utara menurut

kelompok umur sasaran program pada tahun 2017 didominasi oleh penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yaitu sebanyak 60.101 jiwa. Penduduk usia balita (0-4 tahun) dan penduduk usia dini (5-6 tahun) sebesar 17.355 jiwa dan 7.076 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu indicator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja, ataupun yang menganggur (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

Tabel 4.1 Luas dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk
		Km2	Jumlah
1	Kema	78,76	17012
2	Kauditan	108,2	24555
3	Airmadidi	86,66	29160
4	Kalawat	39,03	31973
5	Dimembe	166,43	23983
6	Talawaan	82,51	21601
7	Wori	90,7	16667
8	Likupang Barat	104,29	15865
9	Likupang Timur	290,84	15351
10	Likupang Selatan	11,82	4818
	Jumlah / Total	1059,24	200985

Sumber : Kab. Minahasa Utara Dalam Angka 2018



Gambar 4.2 Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kab. Minahasa Utara



Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kab. Minahasa Utara

Tahun 2017, lebih dari setengah penduduk Minahasa Utara merupakan angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, TPAK Minahasa Utara pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari 55,62 persen menjadi 60,85 persen. Kenaikan Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran menjadi sebesar

9,48 persen dari 10,08 persen pada tahun 2014 (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama pada 2014 - 2017, terjadi pergeseran sektor yang mendominasi penyerapan tenaga kerja. Selama 2014-2017, tenaga kerja terserap oleh sektor primer semakin kecil sedangkan sektor tersier semakin tinggi. Pada tahun 2017 sektor tersier mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 58,53 persen. Diikuti sektor primer 22,17 persen dan sektor sekunder 19,29 persen. Komposisi penduduk Minahasa Utara tahun 2017 didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu sebesar 68,19 persen Berdasarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 46,64 persen, artinya setiap seratus orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduduk yang bekerja tertinggi di usia antara 35-39 tahun (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada tahun 2014, penghitungan IPM menggunakan metode baru, dimana komponen angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah dan penghitungannya menggunakan rata-rata geometrik menggantikan rata-rata aritmatik pada metode lama. Angka IPM Minahasa Utara periode 2010-2017 terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2016 angka IPM Minahasa Utara adalah 71,49 meningkat menjadi 72,20 pada tahun 2017 (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

Secara Regional, pada tahun 2017 IPM Minahasa Utara ada perubahan peringkat menjadi urutan ke-5 yang sebelumnya urutan ke-6 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi

Utara. Dimana nilai IPM Minahasa Utara masih dibawah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kota Bitung (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Utara berada pada posisi ke-5 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 72,2. Tahun 2017 posisi IPM Minahasa Utara di urutan ke-5. IPM Minahasa Utara masih dibawah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa. Dari PDRB yang mampu dihasilkan selama tahun 2017 di Minahasa Utara mampu memompa perekonomian untuk tumbuh sebesar 6,52 persen. Pertumbuhan ekonomian Minahasa Utara tumbuh pada urutan kedua dari 15 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pertumbuhan ekonomi Minahasa Utara masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi. Jumlah penduduk Minahasa Utara menempati posisi ke 6 di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 8,25 persen. Jumlah penduduk Minahasa Utara sebanyak 200,98 ribu orang. Persentase penduduk miskin sebesar 7,46 persen atau sekitar 14,93 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Minahasa Utara pada tahun 2017 di bawah rata-rata Kabupaten/Kota Sulawesi Utara dengan menempati peringkat 6 terendah di bawah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Bolaang Mongondow timur (BPS Kab. Minahasa Utara, 2018).

B. Metode

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pola hubungannya, jenis penelitian ini adalah *explanatory research* yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesa (Singarimbun dan Efendi, 1995). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian dengan pendekatan angka-angka baik dalam pengumpulan data, analisa data hingga interpretasi data didasarkan pada hasil analisa data yang berupa angka. Metode yang digunakan adalah survey, sebagai metode yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Proses penelitian merupakan suatu fenomena sosial dalam bidang pendidikan transformasi komponen informasi ilmiah (Iskandar, 2010).

Variabel Penelitian

Variable penelitian terdiri atas: ***Literasi Ekonomi***, dengan indicator: Afektif; Kognitif; dan Psikomotorik, ***Modal Sosial***, dengan Indikator: Partisipasi dalam Jaringan; Resiprocity; Trust; Norma Sosial; Nilai-nilai; Tindakan yang Proaktif, dan ***Kesejahteraan Ekonomi***, dengan indicator: 1) kebutuhan dasar yang terdiri dari pangan, sandang, papan dan kesehatan; 2) kebutuhan sosial psikologis yang terdiri dari pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal; dan 3) kebutuhan pengembangan yang terdiri dari tabungan dan akses terhadap informasi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 230 responden yang diperoleh dari masyarakat pesisir di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Adapun sampel menggunakan

rumus dari Daniel dan Terrel (1989) dengan tingkat kesalahan ditetapkan 5 persen. Hasil perhitungan diperoleh sampel penelitian adalah 100 sampel.

Pengujian Instrumen

Untuk mengukur validitas digunakan rumus *Pearson Product Moment* dan Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan (keterandalan) alat pengumpul data (instrument) yang digunakan. Uji reliabilitas instrument dilakukan dengan rumus *alpha cronbach* (Riduwan dan Kuncoro, 2007)

Teknik Analisis Data

Sesuai kerangka konseptual dan empiris, penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisa regresi linier berganda (multiple regression). Teknik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara variable independent dengan dependent.

Pengujian Hipotesis

Adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan kata lain ada pengaruh variabel *eksogen* terhadap variabel *endogen*. H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan kata lain variabel *eksogen* tidak berpengaruh terhadap variabel *endogen*. Pengujian ini dilakukan dengan derajat bebas/ *degree of freedom* 95% $\alpha = 0,05$.

C. Pembahasan

Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa pengaruh literasi ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi diperoleh koefisien beta sebesar 0.741, dengan nilai t_{hitung} sebesar 10.932 dan Sig t sebesar 0.000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10.932 > 1.980$) dan Sig t < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan dan positif Literasi Ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi. Karena koefisien path bertanda positif (0.741) mengindikasikan hubungannya positif. Artinya semakin tinggi literasi ekonomi akan semakin tinggi kesejahteraan ekonomi.

Temuan ini menggambarkan bahwa pembelajaran literasi ekonomi ditengah masyarakat melalui pengalaman dan penanaman sikap, dapat membentuk individu sebagai pelaku ekonomi yang efektif dan efisien di lingkungan keluarga. Pembelajaran ini bersifat nonformal, yang dicirikan oleh rencana yang tidak sistematis, tidak terjadwal dan tidak dirumuskan dengan jelas, target dan tujuannya. Sejalan dengan penjelasan Yunus, dkk. (2010) melakukan penelitian tentang literasi ekonomi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan ekonomi, tabungan, pengeluaran dan investasi memiliki hubungan dengan literasi ekonomi dan untuk mengukur sejauh mana pendidikan ekonomi, tabungan, pengeluaran dan investasi mempengaruhi literasi ekonomi. Sina, P.G (2012), menjelaskan bahwa literasi ekonomi memiliki tujuan sebagai upaya meningkatkan kemampuan memahami konsep ekonomi bagi individu maupun rumah tangga yang menginginkan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kewajiban meningkatkan literasi ekonomi perlu dilakukan secara terencana dan diawali dari niat untuk belajar meningkatkan literasi ekonomi karena dapat

berefek pada akumulasi aset, pengelolaan utang yang tepat, proteksi, meningkatkan tabungan dan cerdas mengelola pengeluaran.

Pengaruh Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh antara Modal Sosial terhadap Keputusan Kesejahteraan Ekonomi diperoleh koefisien beta sebesar 0.980, dengan nilai t_{hitung} sebesar 21.438 dan Sig t sebesar 0.000. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($21.438 > 1.980$) dan Sig t < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi. Artinya dengan meningkatnya nilai modal sosial, nilai kesejahteraan ekonomi akan meningkat pula.

Temuan ini menjelaskan bahwa modal sosial dapat menjadi modal stimulan bagi komunitas nelayan untuk terbukanya peluang dan potensi modal lainnya. Konsep modal sosial, yang awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya, mereka membuat kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hisbullah (2006) bahwa salah satu variable positif yang mempengaruhi kesejahteraan adalah adanya modal komunitas sebagai modal sosial yang dimiliki oleh komunitas masyarakat pesisir. Hisbullah (2006) memberikan pertimbangan indikasi-indikasi dari modal sosial sebagai partisipasi dalam suatu jaringan; *reciprocity*; *trust*; norma sosial; nilai-nilai; dan tindakan yang proaktif. Hal tersebut oleh Nasution (2007) mempertegas bahwa pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang bersumber pada kekuatan modal sosial masyarakat sendiri telah terbukti dapat mengurangi sikap *selfish* dan *free rider*, dan akhirnya cenderung lebih efektif mendorong ke arah pemanfaatan sumberdaya yang *sustainable*.

Pengaruh Literasi Ekonomi dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai $F_{hitung} = 231.899$ sedangkan $F_{tabel} = 1.91$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} = 231.899 > F_{tabel} = 1.91$. Serta $p\ Value\ 0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan syarat di atas berarti hipotesis menyatakan bahwa secara simultan variabel literasi ekonomi dan modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan kontribusi nyata sebesar 0.823. Hal ini berarti, kesejahteraan ekonomi dapat dijelaskan oleh literasi ekonomi dan modal sosial sebesar 82.3%, dan sebesar 17.7% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian ini.

Hasil temuan tersebut membuktikan bahwa literasi ekonomi yang diindikasikan dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan rumah tangga petani dalam mengelola hasil usaha secara efisien, efektif dan ekonomis, dan modal sosial yang diindikasikan sebagai partisipasi dalam suatu jaringan; *reciprocity*; *trust*; norma sosial; nilai-nilai; dan tindakan yang proaktif, dapat memberikan pengaruh signifikan dan hubungan positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Budiwati (2014); Peter G. Sina (2012); Wulandari (2011); Mathews (1999); Hasbullah (2006); dan (Fukuyama. 2002), bahwa literasi ekonomi merupakan suatu konsep yang menjadi penting, karena dengan melek ekonomi berarti memiliki kecerdasan dalam melakukan tindakan ekonomi. Sesuai dengan prinsip efisiensi yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi, tingkat literasi ekonomi yang tinggi mengandung makna bertindak ekonomi (baik produksi, konsumsi maupun distribusi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Literasi ekonomi merupakan

keampilan hidup (*life skill*) yang harus dimiliki oleh siapa saja untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, literasi ekonomi dapat diaplikasikan untuk konteks individu maupun rumah tangga. Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap konsumtif pada masyarakat. Pada prinsipnya literasi ekonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan, hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi ekonomi yang tinggi sehingga mengkerucutkan peluang mencapai kesejahteraan. Salah satu indikatornya adalah menjadi orang yang cerdas dalam mengelola sumber daya ekonominya guna mencapai kesejahteraan. Demikian halnya modal sosial merupakan aspek positif sekaligus modal komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan.

Kemiskinan dalam Perspektif Modal Sosial dan Literasi Ekonomi

Berdasarkan temuan penelitian, mengungkapkan bahwa kemiskinan dan modal sosial merupakan suatu kondisi seperti perlombaan perahu naga, yang mana dengan semangat kebersamaan dan kerjasama tim yang kuat dapat menjalankan perahu dengan lancar dan penuh dengan kesenangan atau kebahagiaan. Demikian halnya dalam kehidupan nyata di masyarakat nelayan, kerjasama, kepercayaan, dan jaringan menjadi warna positif sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang ada. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu: a) factor individual. Terkait dengan aspek patologis

termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin, orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya; b) factor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi; c) faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas; d) faktor structural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin (Suharto, 2013 *dalam* Amalia, A.D, 2015).

Kemiskinan diartikan juga sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. (Soekanto, 2012, *dalam* Amalia, A.D, 2015).

Kewenangan masyarakat untuk melakukan upaya penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Praktik kehidupan dalam keseharian ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan masalah sosial. Berbagai pola penanganan mereka peroleh melalui proses belajar sosial yang berlangsung dalam dinamika interaksi dan relasi sosialnya. Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri tersimpan modal sosial, yang seperti halnya dengan modal fisik dan finansial dapat digunakan sebagai energy penggerak tindakan bersama termasuk dalam menangani masalah sosial dalam hal ini kemiskinan. Modal sosial dapat diidentifikasi dalam bentuk solidaritas sosial yang bersumber dari kesadaran kolektif, saling percaya, asas timbal balik dan jaringan sosial. Modal sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal fisik, modal finansial dan modal keterampilan, kepandaian atau kecerdasan (*human capital*). Modal sosial mempunyai energy yang dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha (Usman, 2015 *dalam* Amalia, A.D, 2015).

Teori modal sosial pada intinya dapat diringkas dalam dua kata soal hubungan. Membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian, atau yang dapat mereka capai tapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut; sejauh jejaring tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal. Selain bisa memberikan manfaat langsung, modal-modal ini seringkali bisa dimanfaatkan dalam latar yang lain.

Keanggotaan jaringan dan seperangkat nilai bersama menjadi inti dari konsep modal sosial (Field, 2014).

Modal sosial dapat diidentifikasi dalam bentuk solidaritas sosial yang bersumber dari kesadaran kolektif, saling percaya, asas timbal balik dan jaringan sosial.

Realitas kehidupan, pemanfaatan modal sosial guna penanganan kemiskinan oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk. Diantaranya yang banyak dijumpai adalah dalam bentuk tindakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup, pemberian jaminan sosial kepada warga masyarakat dan minimalisasi serta penyelesaian konflik sosial. Bentuk yang lain, terutama dilihat dari upaya untuk mengantisipasi masalah sosial, modal sosial yang berupa solidaritas sosial, rasa saling percaya dan asas timbal balik dapat mendorong berbagai bentuk tindakan yang merupakan cerminan kepedulian sosial. Masyarakat tertentu aktivitas itu bukan saja sudah melembaga akan tetapi juga ditata dan diorganisasi dengan baik. Sebagai contoh kasus, ditemukan adanya institusi lokal yang mengorganisasi dan mengelola pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin dilingkungan komunitasnya dengan dana yang berasal dari anggota masyarakat lain yang kebetulan kondisi kehidupannya lebih baik dan bersedia secara sukarela menyisihkan uangnya. Bentuk lainnya, keberadaan modal sosial terutama apabila dikelola dengan baik dapat digunakan untuk memelihara integrasi sosial dalam masyarakat, termasuk yang kondisinya sudah semakin kompleks dengan variasi kepentingan yang kompleks pula. Bentuk yang senafas dengan realitas itu, modal sosial juga dapat berpotensi untuk mengeliminasi konflik sosial. Dalam kondisi tertentu, sering dijumpai bahwa walaupun masyarakat kompleks di dalamnya terkandung solidaritas sosial yang tidak eksklusif akan

tetapi bersifat inklusif lintas kelompok. Disamping itu tidak jarang dijumpai masyarakat yang berhasil membangun pranata bersama yang memayungi seluruh kelompok.

Dalam bentuk yang lain walaupun belum terbangun pranata bersama, tidak jarang nilai-nilai pada masing-masing kelompok juga sudah mengandung inklusivitas, yang mengajarkan penghargaan dan penerimaan kepada orang dari kelompok lain (Soetomo, 2010). Modal sosial dapat tumbuh dengan subur dan bertahan dalam durasi waktu yang lama apabila memperoleh dukungan aktor, dirajut dengan ikatan sosial yang jelas, dan dikembangkan melalui institusi sosial yang di dalamnya terendap relasi-relasi multi dimensi. Sebaliknya modal sosial menjadi lemah dan tidak bisa bertahan lama ketika tidak ada komitmen kuat para aktor, basis ikatan sosial yang kabur dan dipelihara melalui institusi sosial dengan relasi-relasi yang mono dimensi.

Pembahasan tentang modal sosial sebetulnya tidak selamanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi kreativitas dan produktivitas yang berhubungan dengan perdagangan. Satu hal yang sama-sama terendap didalamnya adalah sebuah energy atau kekuatan yang mampu meningkatkan kapasitas adaptif di kalangan masyarakat, sehingga tidak larut dalam kepedihan akibat dampak negative yang timbul dari perubahan lingkungan hidup, energi itu mengalir melalui jejaring yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sipil.

Modal sosial dapat tumbuh dengan subur dan bertahan dalam durasi waktu yang lama apabila memperoleh dukungan aktor, dirajut dengan ikatan sosial yang jelas, dan dikembangkan melalui institusi sosial yang di dalamnya terendap relasi-relasi multi dimensi.

Energi itu mengikuti *rules*, sumber daya (*resources*), dan strategi menanggung resiko (*risk strategy*) yang menekan dalam kehidupan masyarakat sipil. Hasil kajian pada umumnya memperlihatkan bahwa dalam modal sosial terendap elemen-elemen yang berperan amat signifikan dalam memacu sikap dan tindakan inovatif dan produktif. Kemunculan berbagai kelompok usaha produktif dalam masyarakat baik yang tumbuh atas prakarsa masyarakat sendiri maupun yang diinisiasi dari luar merupakan contohnya. Tidak jarang berbagai tindakan bersama yang bersifat produktif tadi diputuskan dan dirancang bersama berdasarkan masalah dan kebutuhan yang diidentifikasi bersama melalui institusi lokal (Usman, 2015).

Demikian halnya dengan kesinambungan penghidupan masyarakat khususnya nelayan, kurang cukup bilamana hanya bermodalkan kerjasama, kepercayaan, atau jaringan. Sedianya pengetahuan dan pemahaman ekonomi yang mumpuni menjadi faktor internal yang dominan mempengaruhi *sustainable* hidup rumah tangga. Kecakapan memahami dan mengaplikasikan konsep ekonomi sebagaimana disebut sebagai literasi ekonomi merupakan salah satu kekuatan bagi individu atau rumah tangga khususnya pada masyarakat nelayan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan kelayakan ekonominya.

Literasi ekonomi diartikan sebagai pemahaman seseorang yang terkristalkan dalam membuat pilihan yang cerdas terkait alokasi sumber daya. Didasari definisi tersebut, peneliti lebih menonjolkan aspek penentuan pembuatan keputusan ekonomi sehari-hari. Hal ini dikarenakan ilmu ekonomi selalu bersentuhan dengan aktivitas sehari-hari. Pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar individu atau rumah tangga untuk dapat belajar dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat sangat berperan penting dalam proses pembentukan literasi ekonomi. Tampak jelas bahwa

literasi ekonomi memainkan peranan yang penting untuk memicu pengendalian diri dalam mengelola sumber daya (*money*) yang terbatas.

Kecakapan memahami dan mengaplikasikan konsep ekonomi sebagaimana disebut sebagai literasi ekonomi merupakan salah satu kekuatan bagi individu atau rumah tangga khususnya pada masyarakat nelayan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan kelayakan ekonominya.

Pengendalian diri tersebut juga akan berpengaruh pada sikap mental untuk lebih fokus pada tujuan keuangan di masa mendatang. Logikanya, pengendalian diri yang diarahkan pada suatu tujuan spesifik akan lebih mudah terealisasi karena membantu seseorang lebih jelas dalam benaknya akan apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan serta apa yang harus dihindari terkait pencapaian tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Literasi ekonomi juga akan membantu untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan diartikan sebagai keinginan yang telah secara jelas ditunjukkan pada suatu produk/jasa sedangkan keinginan adalah hasrat untuk memiliki suatu produk/jasa. Logikanya adalah pemahaman seseorang yang terkristalkan dalam membuat pilihan yang cerdas terkait alokasi sumber daya akan membuka peta pikiran sehingga mampu mendeteksi secara cermat mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan.

Selain itu, literasi ekonomi berpengaruh pada bagaimana mendorong kepekaan akan bagaimana meningkatkan pola pilihan yang cerdas. Maksudnya, bagaimana orang menjadi paham akan bagaimana menganalisis ketika harus membuat keputusan, atau dengan kata lain bahwa pembuat keputusan berpikir dahulu sebelum bertindak sehingga mampu mengikis pembuatan pilihan

yang keliru. Mengapa kami (tim penulis) hanya menyebutkan mengikis dan bukan menghilangkan, hal tersebut disebabkan orang tidak selamanya akan bersikap rasional dalam semua konteks, melainkan dapat saja mengalami bias pada suatu konteks dan rasional dalam konteks yang lain. Dengan demikian, disimpulkan bahwa literasi ekonomi tidak menjamin individu atau rumah tangga menjadi konsumen yang tidak pernah salah, melainkan mendorong menjadi konsumen cerdas, yakni konsumen yang dominan membuat keputusan yang mementingkan *benefit* daripada *cost* dan bukan sebaliknya.

Melalui kombinasi modal sosial dan literasi ekonomi yang kuat, dapat memberikan kepercayaan yang tinggi bagi setiap individu atau masyarakat khususnya rumah tangga nelayan dalam mengoptimalkan kegiatan produksi dan konsumsi yang memenuhi keseimbangan yang maksimal. Hal inilah menjadikan literasi ekonomi semakin penting bagi rumah tangga dalam membuat keputusan, yaitu bagaimana berinvestasi yang tepat, berapa banyak meminjam yang tepat di pasar uang dan bagaimana memahami konsekuensi atas stabilitas keseluruhan ekonomi.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan yang diungkapkan pada bagian depan, beberapa hal yang disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensi yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup, serta kurangnya kemampuan dalam memahami konsep ekonomi.
2. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan terdiri dari: faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam beasiswa mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim dan lain-lain); dan faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.
3. Kesejahteraan ekonomi merupakan hal mendasar sekaligus tujuan yang hendak dicapai oleh setiap rumah tangga khususnya pada masyarakat pesisir. Ukuran kesejahteraan ekonomi dapat menggunakan ukuran pendapatan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Indikator dalam menilai kesejahteraan dapat merujuk dari beberapa konsep, diantaranya: BKKBN, BPS, dan *World Bank*.
4. Modal sosial merupakan kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal-modal lainnya. Modal sosial yang mencakup: kepercayaan (*trust*) yang dapat dipersamakan

dengan kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati; jaringan (*networks*) yang dapat dipersamakan dengan partisipasi, resiprositas, solidaritas, dan kerjasama; dan norma (*norms*) yang dapat dipersamakan dengan nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, dan aturan-aturan.

5. Literasi ekonomi merupakan suatu konsep yang menjadi penting, karena dengan melek ekonomi berarti memiliki kecerdasan dalam melakukan tindakan ekonomi. Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap konsumtif pada masyarakat. Literasi ekonomi menjadi sangat penting untuk membuka pengetahuan tentang biaya/manfaat suatu barang dalam aktivitas ekonomi.
6. Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi literasi ekonomi akan semakin tinggi kesejahteraan ekonomi. Temuan ini menggambarkan bahwa pembelajaran literasi ekonomi ditengah masyarakat pesisir khususnya rumah tangga nelayan melalui pengalaman dan penanaman sikap, dapat membentuk individu sebagai pelaku ekonomi yang efektif dan efisien di lingkungan keluarga. Pembelajaran ini bersifat nonformal, yang dicirikan oleh rencana yang tidak sistematis, tidak terjadwal dan tidak dirumuskan dengan jelas, target dan tujuannya.

Literasi ekonomi merupakan suatu konsep yang menjadi penting, karena dengan melek ekonomi berarti memiliki kecerdasan dalam melakukan tindakan ekonomi

7. Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa dengan meningkatnya nilai modal sosial, nilai kesejahteraan ekonomi akan meningkat pula. Temuan ini menjelaskan bahwa modal

sosial dapat menjadi modal stimulan bagi komunitas nelayan untuk terbukanya peluang dan potensi modal lainnya. Konsep modal sosial, yang awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya, mereka membuat kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya.

Ukuran kesejahteraan ekonomi dapat menggunakan ukuran pendapatan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.

8. Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa Hasil temuan tersebut membuktikan bahwa literasi ekonomi yang diindikasikan dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan rumah tangga petani dalam mengelola hasil usaha secara efisien, efektif dan ekonomis, dan modal sosial yang diindikasikan sebagai partisipasi dalam suatu jaringan; *reciprocity*; *trust*; norma sosial; nilai-nilai; dan tindakan yang proaktif, dapat memberi pengaruh signifikan dan hubungan positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir khususnya rumah tangga nelayan.
9. Kombinasi modal sosial dan literasi ekonomi yang kuat, dapat memberikan kepercayaan yang tinggi bagi setiap individu atau masyarakat khususnya rumah tangga nelayan dalam mengoptimalkan kegiatan produksi dan konsumsi yang memenuhi keseimbangan yang maksimal.
10. Model pengentasan kemiskinan melalui literasi ekonomi dan modal sosial dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun rencana strategis, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa Hasil temuan tersebut membuktikan bahwa literasi ekonomi yang diindikasikan dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan rumah tangga petani dalam mengelola hasil usaha secara efisien, efektif dan ekonomis, dan modal sosial yang diindikasikan sebagai partisipasi dalam suatu jaringan; reciprocity; trust; norma sosial; nilai-nilai; dan tindakan yang proaktif, dapat memberi pengaruh signifikan dan hubungan positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir khususnya rumah tangga nelayan.

B. Saran

Berdasarkan bahasan dan ulasan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa saran sekaligus rekomendasi yang dapat dikemukakan:

1. Model pengentasan kemiskinan dengan literasi ekonomi dan modal sosial, dapat memberikan pengaruh mengubah pola berpikir masyarakat pesisir, sehingga temuan penelitian dan tulisan dalam buku ini dapat mengefektifkan dan meningkatkan upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Bagi masyarakat pesisir secara keseluruhan, modal sosial merupakan kekuatan komunitas yang senantiasa harus dipertahankan dan ditingkatkan, dan dengan literasi ekonomi yang memadai, untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang layak pasti dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron HS (2012). Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurna Riptek* Vol. 6, No.I, Tahun 2012, Hal. 27 – 37
- Ayu Diah Amalia (2015). Modal Sosial Dan Kemiskinan (Social Capital And Poverty). *Sosio Informa* Vol. 1, No. 03, hal. 310-323, September - Desember, Tahun 2015
- Badaruddin (2006). Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Komunitas (Studi pada Komunitas Petani Karet di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Jurnal Wawasan*, Vol. 12 No. 2 Hal: 118-125
- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi. 2005. Indikator Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan: Executive Summary. BBRSE. Jakarta. 43 hal.
- Bambang Rustanto (2007). Penguatan Keluarga Miskin melalui Penguatan Modal Sosial. *Jurnal Informasi*, Vol 12. No. 03 tahun 2007 hlm: 22-31.
- Bondan Satriawan dan Henny Oktavianti (2012). Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, No 1 Juni 2012, hlm 96-112.
- Bourdieu, P. (1983). „Forms of capital“ in J. C. Richards (ed.). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press. Dikutip dari situs www.google.com – *social capital: civic community and education/social_capital*
- BPS 2011 *Statistik Indonesia*
- BPS 2018. *Statistik Indonesia*. Kab. Minahasa Utara, 2013
- Budiwati N, 2014. Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Literasi Ekonomi (Studi pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri Kota Bandung). Repository UPI. Bandung
- Cernea, M.M. 1988. Sosiologi Untuk Proyek-Proyek Pembangunan, dalam M.M. Cernea (Ed). Mengutamakan

- Manusia Dalam Pembangunan; Variabel-Variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan. Publikasi Bank Dunia. Penerjemah; B.B.Teku. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hal: 3-26
- Chambers, Robert, (1983). *Rural Development, Putting the Last First*, Longman: London.
- Coleman, J. 1999. *Social Capital in The Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press
- Coleman, J.S. 1988. *Foundations of social Theory*. Cambridge: Harvad University Press.
- Cullen, Michelle and Harvey Whiteford. 2001. *The Interrelations of Social Capital with Health and Mental Health. Discussion Paper*. Mental Health and Special Programs Branch Commonwealth Department of Health and Aged Care. Canberra : The Commonwealth Australia.
- Dasgupta dan Serageldin, ,2000, *Social Capital, The World Bank*, Washinton DC.
- Deshinta Vibriyanti (2014). Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 9 No. 1 Tahun 2014 (ISSN 1907-2902).
- Dias Kanserina (2015). Pengaruh Literasi Ekonomi Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha 2015. Vol: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015.
- Edwin Wantah (2017). Pemberdayaan Nelayan Berbasis Pendidikan Ekonomi Dan Potensi Pesisir Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS. JTP2IPS* Volume 2 Nomor 2, Oktober 2017: hal 43-51. P-ISSN 2503-1201 | E-ISSN 2503-5307. © FIS, Universitas Negeri Malang 2017. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jtppips>
- Field, John. (2014). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana Offset
- Forsyth, Anita. (2006). *Economic Literacy-An Essential Dimension in the Social Education Curriculum for the*

- Twenty-first Century*. Australia: Monash University: The Social Educator.
- Fukuyama Francis, 1995, *Trust: The SOCIAL Virtue and The Creation of Prosperity*, New York Free Press,
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital, Civil Society, and Development*. Third World Quarterly, 22 (1):7-200
- Hasanudin, Basri.1985. "Beberapa Hal Mengenai Struktur Ekonomi Masyarakat Pantai", dalam A.S. Achmad dan S.S. Acip (Peny.). *Komunikasi dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, hal. 105-110.
- Hasbullah, Jaousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press
- Hikmat, Harry, (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Bandung.
- Iin Indarti (2015). Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 12 No. 1 Maret 2015.
- Inayah (2012). Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 12 No. 1, April 2012 hal: 43-49
- Ishak Manggabarani (2016). Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai (Studi Kasus Lingkungan Luwaor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene) *Jurnal AGROVITAL*. Volume 1, Nomor 1, November 2016 E-ISSN : 2541-7460 | P-ISSN : 2541-7452
- Jamasy, Owin, 2004. *Keadilan, Pemberdayaan & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- Jocom S. G (2015). Keterkaitan Antara Modal Sosial Dan Kemiskinan Menurut Tahapan Perkembangan Desa Di Provinsi Gorontalo. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2015.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta.

-
- Kinloch, G. C, 2005, *Perkembangan dan Paradigma Utama : Teori Sosiologi*: Pustaka Setia Bandung.
- Kusnadi. 2002. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Jogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Lawang, R. 2004. *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik*. Fisip UI Press. Jakarta
- Lilik Sri Hariani (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Ekonomi Mahasiswa Pedidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Prosiding Seminar Nasional Penelitian 2015 LPPM Universitas Kanjuruhan Malang, 6 Juni 2015. Volume 3, Nomor 1, Juni 2015. ISSN: 2088-1679
- Masyhuri Imron dan M. Azzam Manan. 2009. Strategi Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan. LIPI. Jakarta.
- Mubiyarto, dkk, 1984, *Nelayan dan Kemiskinan* Radjawali Press, Jakarta
- Mubyarto dan Sartono Kartodirjo. 1981 *Pembangunan perdesaan di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad risal (2016). Melawan Kemiskinan Struktur (Studi Kasus Nelayan Mandar Di Desa Bonde Kabupaten Majene). Program pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Nakajima, C. 1986 Subjective Equilibrium Theory Of The Farm Household. Developments in Agricultural Economics. Elsevier Science Publisher B.V. Printed in The Netherlands.
- Neng Kamarni (2012). Analisis Modal Sosial sebagai Salah Satu Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 03 No. 03 hal: 36-52.
- Neti Budiwati (2014). Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Literasi Ekonomi (Studi pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri Kota Bandung).
-

- Otniel Pontoh (2010). Identifikasi Dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Perikanan dan Kelautan tropis*, Vol. 6 No.3, Desember 2010 hlm: 125-133.
- Panuntun, Tryo Dinda, Moh. Aris Munandar, Eko Handoyo (2013). Peranan Kud Karya Mina Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kota Tegal. *Unnes Civic Education Journal* 2 (2) (2013) ISSN 2252-6293. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej>
- Peter Garlans Sina, 2012. Analisis Literasi Ekonomi. *Jurnal Economia*, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2012
- Pranadji Tri (2006). Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering. Studi Kasus: Desa-desa (Hulu DAS) ex Proyek Bangunan Lahan Kering, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Argo Ekonomi*, Vol. 24, No. 2, Hal. 30-39
- Prasetyo P. E dan Siti Maisaroh (2009). Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Trikonomika*, Volume 8, No. 2 Desember 2009, Hal. 103-125. ISSN 1411-514X
- Putnam, R. D. 1995. 'Bowling Alone: America's Declining Social Capital', *Journal of Democracy* 6:1, Jan, 65-78 dikutip dari www.eaglenet.lambuth.edu
- Putnam, R.D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *American Prospect*, 13, Spring, 35-42. In Elinor.
- Qomariah. 2009. *Pengaruh modal sosial terhadap kinerja LKMS dan kesejahteraan masyarakat pada LKMS di Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur*. Disertasi PPS-UB Malang.
- Qoriah Saleha (2010). Profil Aktivitas Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Profile of Economic Activity and Welfare of Fisherman

-
- Society at Pela Village of Kutai Kartanegara Regency).
EPP.Vol. 7. No.2 2010 :48-53
- Riduwan, dan Kuncoro. 2007. “*Analisis Jalur Path Analysis: Cara Menggunakan dan Memakai*”. Cetakan Kedua, Penerbit, Alfabeta.
- Rosni (2017). Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di desa dahari selebar kecamatan talawi kabupaten batubara. *Jurnal geografi*. Vol. 9 No. 1- 2017. e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167.
- Saefuddin, dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial)*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salemi, Michael K. (2005). *Teaching Economic Literacy: Why, What and How*. *International Review of Economics Education*. Volume 4 (2): 48
- Satria, A. 2002. Karakteristik Sistem Sosial Masyarakat Pesisir. Makalah disampaikan pada Pelatihan ICZPM. Kerjasama BAPPEDA Asahan dengan PKSPL, IPB Bogor.
- Soemardjan, Selo, 1986. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soetrisno, Loekman (1995) *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Sri Nurhayati Qodriyatun (2013). Enhancement of Coastal Community Welfare in Batam Through Community Empowerment. *Jurnal Aspirasi* Vol. 4 No. 2, Desember 2013. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Suandi (2007). Modal Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi. Disertasi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Alfabeta Bandung
- Suharto, E. 2008. Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep dan
-

- Strategi.http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.
- Sumodiningrat, Gunawan, (1999). *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Sutrisno. L. 1999. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Erlangga, Jakarta
- Uphoff, N, 2000. Understanding Social capital: Learning from the analysis and experience of participation. Di dalam Dasgupta P. Ismail S, 1999, editor. *Social capital A Multifaceted Perspective*. The world bank, Washington.
- Usman, Sunyoto. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wafa, A. 2003. Keberadaan *Social Capital* Pada Kelompok-kelompok Sosial : Kasus Pada Kelompok Tani Mardi Utomo dan Kelompok PKK. *Tesis*. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Wahyono, H. 2001. Pengaruh Perilaku Ekonomi Kepala Keluarga Terhadap Intensitas Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Keluarga. *Disertasi, Pascasarjana Universitas Negeri Malang*
- Wasak M. (2012). Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *PACIFIC JOURNAL. Januari 2012 Vol. 1 (7): 1339 - 1352* ISSN 1907 – 9672
- Yenida, Elni (2016). Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di wilayah Pesisir Pantai Sumatera Barat. *Prosiding: National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*. Politeknik Negeri Padang, 15 – 16 Oktober 2016 ISSN:2541-111x

BIODATA PENULIS

Tamboto, Henry J. D., Prof. Dr., M.Si., Drs

Dilahirkan di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan 29 Juli 1960. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada: SD GMIM Pinasungkulan tahun 1972, SMP Negeri Modinding 1975, SMA Kristen Tomohon 1980. Melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi pada:

S1 Program Studi Pendidikan Dunia Usaha FPIPS IKIP Negeri Manado tahun 1985 dengan gelar Sarjana Pendidikan (Drs), S2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1993 dengan gelar Magister Sains (M.Si), dan mendapatkan gelar Doktor (Dr) tahun 2006 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Penulis tahun dan 1986 diangkat menjadi dosen/PNS pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Manado. Penulis mendapat gelar Profesor pada tahun 2010. Sepanjang kariernya penulis antara lain pernah menjabat Deputy PR.1. Universitas Negeri Manado tahun 2007-2008, Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado selama 2 periode (tahun 2008-2012, dan 2012-sekarang). Saat ini penulis adalah dosen senior pada Program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Penulis juga mengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi S2, Program Studi IPS S2, Program Studi Manajemen Pendidikan S2, Program Studi Administrasi Negara S2, pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado. Juga sebagai Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado.

Manongko, Allen A.Ch. , Dr., M.M., S.Pd

Dilahirkan di Manado 14 April 1974. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada: SD GMIM 1 Tompaso tahun 1986, SMP Negeri Tompaso 1989, SMA Negeri Tompaso 1992. Melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi pada: S1 Program Studi Pendidikan Dunia Usaha FPIPS IKIP Negeri Manado tahun 1997 dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), S2 Program Studi Manajemen Pascasarjana FE-Universitas Brawijaya dengan gelar Magister Manajemen (M.M), dan mendapatkan gelar Doktor (Dr) tahun 2015 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Penulis diangkat menjadi dosen/PNS tahun 2006 pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, dan sejak tahun 2007 menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Penulis juga mengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi S2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado. Beberapa Buku Referensi telah diterbitkan antara lain: Buku Pemasaran Hijau (2012); Buku Filsafat dalam Perspektif Pendidikan (2017), dan Buku Green Marketing (Suatu Perspektif Marketing Mix & Theory of Planned Behavior) (2018).



Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir dengan membentuk dan memiliki kebudayaan khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir, yang sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan. Nelayan selalu diidentikkan sebagai komunitas marginal dan terbelakang. Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multi dimensi yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup, serta kurangnya kemampuan dalam memahami konsep ekonomi.

Buku ini hadir untuk memberikan deskripsi dan analisis model pengentasan kemiskinan dengan menghadirkan konsep literasi ekonomi dan model sosial dalam menjawab dan membelajarkan serta mengembangkan potensi-potensi lokal masyarakat pesisir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Secara spesifik buku ini membahas beberapa hal yang terkait dengan: permasalahan kemiskinan dengan pertimbangan penelitian-penelitian terdahulu, konsep kesejahteraan ekonomi, konsep literasi ekonomi, dan modal sosial, serta memuat deskripsi masyarakat pesisir di beberapa desa di kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.



Dr. Allen A.Ch. Manongko, M.M



Prof. Dr. Henry J.D. Tamboto, M.Si



www.SeribuBintang.co.id

[@ info@SeribuBintang.co.id](mailto:info@SeribuBintang.co.id)

fb.com/cv.seribu.bintang



www.makarialearningcenter.com

[@ penerbit.makaria@gmail.com](mailto:penerbit.makaria@gmail.com)

ISBN 978-623-7000-01-3



9 786237 000013